

**IMPLEMENTASI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI TINGKAT
SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN BALARAJA
TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan ilmu politik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Dewi Apriningtyas

NIM. 062376

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Apriningtyas

NIM : 062376

Tempat tanggal lahir : Serang, 24 April 1988

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009 adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, April 2011

Dewi Apriningtyas

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : DEWI APRININGTYAS
Nim : 062376
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) SE-KECAMATAN BALARAJA TAHUN 2009

Serang, April 2011

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Kandung S N, S.Sos., M.Si

Rahmawati, S.Sos., M.Si

NIP.197809182005011002NIP.19790525005012001

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. H. A. Sihabudin, M.Si

NIP.196507042005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DEWI APRININGTYAS
Nim : 062376
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) SE-KECAMATAN BALARAJA TAHUN 2009

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 18 bulan April tahun
2011 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 18 April 2011

Ketua Penguji:

(Drs. H. Oman Supriadi, M.Si)
NIP.195806061986031003

.....

Anggota:

(Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si)
NIP.197603192005011004

.....

Anggota:

(Rahmawati, S.Sos., M.Si)
NIP.19790525005012001

.....

Dekan FISIP Untirta

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. H. A. Sihabudin, M.Si
NIP.196507042005011002

Kandung S N, S.Sos., M.Si
NIP.197809182005011002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku dedikasikan untuk :

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Kakak dan Adik serta Semua Keluarga Besarku*
- *Seseorang yang slalu menemani hidupku*
- *Sahabat – Sahabatku*
- *Almamaterku*

Sembah Sujudku pada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepadaku dan yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan kebesaran-Nya. Nabi Muhammad SAW sang pembimbing umat. Terima kasih ku ucapkan kepada mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangatnya untukku agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini..

*Hormat dan Baktiku Kepada Ayahanda tercinta Dwito
dan Ibunda tersayang Karsih*

kakak dan adikku yang tersayang dan terkasih

Eko Wibowo dan Agus Triwibawanto

Teruntuk kekasihku Mugi Nurhidayah, SE

Serta Semua keluarga besarku

Skripsi ini ku persembahkan . .

LEMBAR MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu, telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Al-Insyiroh; 6-8)

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu (Ali bin Abu Thalib)

”Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar.. karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.”

(Henry Ford)

“Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan”.

(Mario Teguh)

“Jika Anda ingin berbahagia selama satu jam, silakan tidur siang. Jika Anda ingin berbahagia selama satu hari, pergilah berpiknik. Bila Anda ingin berbahagia seminggu, pergilah berlibur. Bila Anda ingin berbahagia selama sebulan, menikahlah. Bila Anda ingin berbahagia selama setahun, warisilah kekayaan. Jika Anda ingin berbahagia seumur hidup, cintailah pekerjaan Anda.”(Promod Brata)

Suatu kenyataan mengatakan bahwa : ” Bukan sebuah peluang yang dapat menciptakan suatu kemauan, akan tetapi dari sebuah kemauanlah yang akan mampu menciptakan sebuah peluang”. (John C Maxwell).

ABSTRAK

Dewi Apriningtyas. NIM 062376. Skripsi. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009.

Kata kunci : Implementasi dana BOS

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009. Program BOS merupakan wujud kepedulian pemerintah yang menyediakan bantuan bagi sekolah untuk meringankan beban siswa, terutama untuk siswa yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar se-kecamatan balaraja tahun 2009. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Sekolah Dasar, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, komite, dan perwakilan satu orang tua siswa dari tiap sekolah. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 116 dikurangi 7 kepala sekolah yang merangkap. Dengan demikian sampel pada penelitian ini berjumlah 109 responden. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan menggunakan sampling jenuh. Teori yang digunakan adalah teori yang diungkapkan Grindle mengenai implementasi kebijakan yang terdiri dari dua dimensi yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (konteks kebijakan). Dalam mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Untuk menganalisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel uji pihak kiri. Hasil perhitungannya diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel ($25,525 > 1,659$) dan didukung dari hasil yang dicapai 78,9 % dari nilai yang di hipotesiskan 65 %. Ini berarti bahwa implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Balaraja sudah berjalan dengan baik. Karena para pelaksana program BOS di sekolah dasar memiliki kesatuan informasi yang tinggi, sehingga satu sama lain saling mendukung dalam melaksanakan program BOS di sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi isi kebijakan (*content of policy*), dan dimensi konteks kebijakan (*context of policy*). Dimana masing masing dimensi memiliki tingkat keberhasilan sebesar 83,9% untuk dimensi isi kebijakan, dan 66,2% untuk dimensi konteks kebijakan. Dengan demikian dari pelaksanaan program BOS yang sudah baik, maka para pelaksana program BOS harus mempertahankan kesatuan informasi yang sudah terjalin dengan baik.

ABSTRACT

Dewi Apriningtyas. NIM 062376. Thesis. Implementation Fund School Operational Assistance (BOS) at the elementary school level (SD) A Balaraja District in 2009.

Keywords: Implementation BOS

The focus of this research is the implementation of Dana School Operational Assistance (BOS) at Level Elementary School (SD) A District in 2009 Balaraja. BOS program is a form of government concern which provides assistance to schools to ease the burden on students, especially for students who are less able to travel to nine-year compulsory education. The purpose of this study to find out how the implementation of school operational funds (BOS) at the elementary level a sub-district in 2009 Balaraja. The method used is quantitative descriptive. The population in this study are 29 primary schools, which consists of principals, treasurers, committees, and representatives of parents of students from each school. So the sample in this study amounted to 116 minus seven principals who doubles. Thus the sample in this study amounted to 109 respondents. Sample collection technique is to use a saturated sampling. The theory used is the theory expressed Grindle regarding policy implementation that consists of two dimensions of the content of policy (policy content) and context of policy (policy context). In collecting data by distributing questionnaires. To analyze the data using hypothesis testing one sample t-test test-left party. The result of the calculation is obtained by $t\text{-basar} > t\text{-table}$ ($25.525 > 1.659$) and supported from the results achieved 78.9% of the value of the hypothesized 65%. This means that the implementation of school grants operasioanl (BOS) at the elementary level (SD) after sub Balaraja been running well. Because the BOS program managers in primary schools have a higher unity of information, so that each other mutual support in implementing programs in schools BOS. This can be seen from the two dimensions of policy-dimensional content (content of policy), and the dimensions of the policy context (context of policy). Where each dimension has a success rate of 83.9% to dimensions of policy content, and 66.2% for the dimension of the policy context. Thus the implementation of the BOS program has been good, then the BOS program managers must maintain the unity of the information that has been well maintained.

KATA PENGANTAR



Penulis bersyukur kepada Allah SWT, sumber segala hidayah dan ilmu pengetahuan yang telah memberikan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) SE-KECAMATAN BALARAJA TAHUN 2009”** (penelitian empiris pada Dinas Pendidikan yang ada di Balaraja). Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammmad SAW, Keluarga, Sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan hati yang tulus, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. H.Sihabudin, M.Si, Dekan Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtaya Serang.
3. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si, Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Dra. Rahmi Winangsih M.Si., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati., S.Ikom, Pembantu Dekan III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Kandung Sapto Nugroho., S.Sos., M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku dosen Pembimbing I.
7. Rina Yulianti, S.Ip., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing II yang memberikan bimbingan serta petunjuk sampai tersusunnya dalam pembuatan skripsi ini.
9. Dwito orang tua saya yang tercinta, yang telah banyak membantu dalam semua hal, terutama do'a.
10. Karsih orang tua saya yang tercinta, yang telah banyak membantu dalam semua hal, terutama do'a.
11. Kakakku Eko wibowo yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang selalu memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
12. Adikku Agus triwibawanto dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang selalu memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
13. Mugi Nurhidayah, SE tercinta dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang selalu membantu dan memotivasi dalam pembuatan skripsi
14. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2006/NR. Teruntuk Yulia Kurniatisari, Gitry Wulanjani, Irmayati, Rosmawati.
15. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja yang telah memberi ijin penulis untuk melakukan penelitian di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja.

16. Rosnani, S.Pd selaku kepala sekolah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
17. Rustini, S.Pd yang telah membantu dalam memberikan informasi dana BOS.
18. Zaenal Abidin selaku komite yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan memberikan informasi kepada peneliti.
19. Edi Rohadi, S.Pd selaku bendahara yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan memberikan informasi kepada peneliti.
20. Ika Atikah. S.Pd selaku yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan memberikan informasi kepada peneliti.
21. Dewi Sartika selaku perwakilan satu orang tua siswa

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini hasilnya masih jauh dari kata sempurna, namun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak yang memerlukan. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal dan kebaikan bagi mereka semua sebagaimana mestinya, Amin.

Serang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
1.3 Perumusan Masalah.....	10

1.4	Tujuan Penelitian.....	11
1.5	Manfaat Penelitian.....	11
1.6	Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1	Tinjauan Pustaka.....	14
2.2	Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.3	Pengertian Implementasi kebijakan.....	19
2.4	Konsep Dana Bantuan Operasional (BOS).....	26
2.5	Kerangka Berpikir.....	31
2.6	Hipotesis.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian.....	34
3.2	Instrumen Penelitian.....	35
3.3	Populasi dan Sampel.....	38
3.3.1	Populasi.....	38
3.3.2	Sampel Penelitian.....	38
3.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
3.4.1	Pengujian Data.....	42
3.4.1.1	Uji Validitas.....	42
3.4.1.2	Uji Reliabilitas.....	43

3.5	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	44
-----	-----------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	45
4.2	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	47
4.3	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	49
4.4	Deskripsi Data.....	50
4.4.1	Identitas Responden.....	50
1.	Jenis Kelamin.....	51
2.	Usia Responden.....	52
3.	Pendidikan Terakhir.....	53
4.4.2	Analisis Data.....	54
4.4.2.1	Dimensi Pertama Isi Kebijakan (<i>content of policy</i>).....	55
4.4.2.2	Dimensi kedua konteks Kebijakan (<i>context of policy</i>).....	83
4.5	Pengujian Hipotesis.....	94
4.6	Interpretasi Hasil Penelitian.....	97
4.7	Pembahasan.....	99

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Periode penyaluran dana BOS tahun 2009.....	9
Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert.....	36
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen.....	37
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen.....	48
Tabel 4.2 Statistik Reliabilitas.....	49
Tabel 4.3 One-Sampel Statistics.....	95
Tabel 4.4 Statistik t-test Satu Sampel.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 2 Jenis Kelamin	51
Gambar 3 Usia Responden	52
Gambar 4 Pendidikan terakhir	53
Gambar 5 Kurva Penolakan dan penerimaan Hipotesis	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Kurangnya sosialisasi mengenai dana BOS dari pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja ke Sekolah.....	55
Grafik 4.2	Pendanaan pendidikan sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah.....	57
Grafik 4.3	Adanya keterbukaan komite mengenai anggaran dana BOS kepada orang tua siswa.....	59
Grafik 4.4	Tidak adanya pungutan dalam bentuk apapun bagi siswa kurang mampu.....	60
Grafik 4.5	Dana BOS sudah membantu meringankan beban masyarakat....	62
Grafik 4.6	Terpenuhinya kebutuhan siswa dari dana BOS sehingga sekolah memiliki fasilitas yang lengkap.....	64
Grafik 4.7	Adanya pungutan biaya LKS.....	65
Grafik 4.8	Sekolah sudah menjamin siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang SMP.....	66
Grafik 4.9	Adanya timbal balik masyarakat terhadap pelaksanaan program BOS.....	68
Grafik 4.10	Tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah.....	69
Grafik 4.11	Pelaksanaan perwujudan tujuan dana BOS sudah mampu membuat akses pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk dapat melaksanakan pendidikan formal.....	71
Grafik 4.12	Pendataan tentang penetapan sasaran dana BOS telah dirapatkan oleh kepala sekolah, bendahara, komite.....	72

Grafik 4.13	Kepala sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabilitas.....	74
Grafik 4.14	Sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola di papan pengumuman sekolah.....	75
Grafik 4.15	Adanya masyarakat yang memberikan dana sukarela kepada sekolah.....	77
Grafik 4.1 6	Adanya pengawasan pelaksanaan dana BOS dari UPT Dinas....	78
Grafik 4.17	Dana BOS yang diterima oleh sekolah tepat jumlah.....	80
Grafik 4.18	Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang mengenai penggunaan dana BOS.....	81
Grafik 4.19	Adanya kesatuan informasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS disekolah.....	83
Grafik 4.20	Terjalannya hubungan yang harmonis antara UPTD pendidikan dengan sekolah.....	85
Grafik 4.21	UPTD pendidikan telah menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.....	87
Grafik 4.22	Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program BOS di Sekolah.....	88
Grafik 4.23	Sudah tidak adanya keterlambatan penyaluran dana BOS di sekolah dasar.....	90
Grafik 4.24	Kurang ketepatan sekolah menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada UPT Dinas pendidikan Balaraja	91
Grafik 4.25	Pihak sekolah atau guru sudah menguasai pengetahuan mengenai penggunaan dana BOS.....	92

Grafik 4.26 Kontinum..... 99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari UPT Dinas Pendidikan
- Lampiran 3 Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS
- Lampiran 5 Daftar Tabel *product momen*
- Lampiran 6 Dokumentasi (Foto) Sekolah Dasar
- Lampiran 7 Daftar Sekolah Dasar di Kecamatan Balaraja
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 8 Surat Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Dimana pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan harkat/martabat bangsa. Indonesia tak henti-hentinya berupaya agar seluruh penduduknya mengenyam pendidikan.

Pada awal tahun 1972, ketika program *long life education* sedang disosialisasikan, kesadaran akan membangun manusia sudah disuarakan oleh Edgar Faure, ketua *The International Commission for Education Development*, yang

menekankan bahwa pendidikan adalah tugas negara yang paling penting. Sumber daya manusia bermutu merupakan prasyarat dasar bagi terbentuknya peradaban yang baik. Sebaliknya, sumber daya yang buruk secara pasti akan melahirkan masyarakat buruk pula¹

Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Bahkan dalam institusi yang terkecil seperti keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama, karena dengan adanya proses pendidikan akan membentuk pola pikir dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi agenda pemerintah yang diprioritaskan agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Namun jika kita melihat pendidikan di negeri ini, sangat jauh diharapkan, bahkan jauh tertinggal oleh negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari ; pertama, yaitu semakin mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak terjangkau akses pendidikan oleh kalangan masyarakat kecil dan menengah. Kedua, yaitu karena rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan baik keahlian maupun kepribadian.

Sejalan dengan amanat undang-undang, kebijakan pembangunan pendidikan kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dan melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Namun pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat selama ini kurang dapat layanan pendidikan dasar seperti ; Masyarakat

¹ Lihat skripsi Budi Hendrawan, 2008

miskin, masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Mengenai banyak anak putus sekolah salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Maka dari itu pemerintah haruslah melakukan suatu tindakan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai pendidikan yakni UU No.20 Tahun 2003, dimana dalam UU tersebut menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Setelah dipaparkan berbagai masalah di atas, hal tersebut terjadi akibat Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan ini memiliki implikasi besar bagi kehidupan masyarakat miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seiring

meningkatnya harga subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia. Hal ini berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa untuk membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan. Dengan demikian untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Maka pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya dari pengurangan subsidi BBM yang diambil dari APBN dan diberikan pada salah satu program, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lainnya dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun.

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan. Biaya pendidikan dan pengelola pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.²

² Lihat Buku Panduan Dana BOS 2009 hal 7-8

- a) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
- i. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana. Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan modal kerja tetap.
 - ii. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
 - iii. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - iv. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- b) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah tingkat SD Se-Kecamatan Balaraja untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus di tanggung oleh orang tua siswa, menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun. Dalam implementasi program ini ada suatu keinginan yang hendak dicapai yaitu :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran atau pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikan ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD atau setara tidak dapat melanjutkan ke SMP atau setara.

Dana BOS yang diberikan kepada sekolah dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana yang diberikan untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah muridnya. Untuk Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja besarnya dana BOS Rp. 397.000, /siswa/tahun. Dimana dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.

2. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, karya ilmiah, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum.
4. Pembayaran bulanan guru honorer yang membantu kegiatan administrasi BOS
5. Pemberian bantuan biaya transport bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
6. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK)

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola oleh kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab utama dan terdiri dari anggota yaitu Bendahara, dewan guru dan komite, sehingga dalam pengelolaan harus mempertimbangkan kredibilitasnya, agar menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Kepada sekolah yang mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS), mereka harus memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang ada selain itu harus transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Pola transparansi dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka dana BOS yang diterima dan diumumkan di papan pengumuman sekolah dasar dengan ditanda tangani oleh komite. Sehingga sekolah harus dibuat rencana kerja yang baik dalam menghimpun keperluan murid yang menggunakan dana BOS. Oleh karena itu, untuk mengawasi pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di wilayah Se-Kecamatan Balaraja supaya tidak

disalahgunakan, maka harus dilakukan suatu pengawasan. Dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh UPT Dinas pendidikan Kecamatan Balaraja.

UPT Dinas Pendidikan merupakan satu lembaga dalam dunia pendidikan yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan sekolah penerima dana BOS melalui MOU (nota kesepakatan), sehingga secara langsung UPT Dinas Pendidikan mengawasi jalannya program dana BOS. Adanya pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu diharapkan agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

Pemberian dana BOS adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan khususnya meringankan pengeluaran operasional sekolah dan orang tua siswa. Dana BOS itu manfaatnya besar, tetapi ke depannya perlu ada evaluasi agar lebih efektif, termasuk implementasi di lapangan. Namun pada kenyataannya sejak program BOS ini diluncurkan dalam pelaksanaan program BOS ini masih ditemukan berbagai masalah yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi bagi sekolah penerima dana BOS sehingga menyebabkan penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada.

Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari daerah ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja. Sehingga mengakibatkan pihak sekolah kurang memahami penggunaan dana BOS dengan tepat. Seharusnya sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak UPTD Pendidikan pada saat dana BOS akan diturunkan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPTD Pendidikan

adalah dengan cara UPTD Pendidikan mengumpulkan semua tim manajemen BOS sekolah di kantor UPTD Pendidikan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS.

2. Terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS hingga 2-3 bulan, terhitung dari waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan dana BOS disebabkan oleh pihak sekolah yang telat menyerahkan surat pertanggung jawaban, sedangkan pemerintah baru bisa mencairkan dana BOS tersebut setelah adanya bukti pengeluaran dari periode sebelumnya yaitu dengan menyerahkan SPJ. Bukti pengeluaran periode sebelumnya yaitu dengan menyerahkan bukti pengeluaran dari bulan Oktober, November, Desember yang diserahkan pihak sekolah pada awal Januari untuk mendapatkan dana BOS periode pertama (Januari, Februari, dan Maret). Tetapi dalam kenyataannya banyak pihak sekolah yang menyerahkan SPJ dana BOS yang sering terlambat, keterlambatannya pun bisa sampai 1 bulan, dikarenakan pada program BOS tersebut banyak sekolah yang belum mengerti tentang penggunaan dana BOS.

Proses pencairan dana bos itu sendiri didahului oleh pihak sekolah dengan memberikan SPJ kepada UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan dengan ketentuan menggunakan format K-2, lalu dari Dinas Pendidikan Kecamatan dibawa ke Dinas Pendidikan Pusat. Setelah itu pemerintah pusat memberikan surat pengambilan dana yang berupa MOU. Dari penjabaran di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Periode penyaluran dana BOS tahun 2009

Periode 1			Periode 2			Periode 3			Periode 4		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Dana diterima bulan Maret			Dana diterima bulan Mei			Dana diterima bulan September			Dana diterima bulan Desember		

Sumber : Seorang Pengawas dari pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja

Keterangan : Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan dibulan pertama setiap triwulan. Namun pada kenyataannya penyaluran dana BOS tidaklah tepat di bulan pertama, hal tersebut mengalami keterlambatan hingga 2-3 bulan.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya program BOS dapat memberikan peranan besar terhadap percepatan dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sebab program BOS juga merupakan untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Sehingga dari program BOS ini banyak memberikan manfaat baik bagi sekolah, guru, murid serta wali murid. Sebab penyaluran dana BOS dan pendidikan gratis merupakan harapan masyarakat dan kesungguhan pemerintah.

Oleh karena itu, dari paparan di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh mengetahui tingkat implementasi program BOS di tingkat SD Se-Kecamatan Balaraja. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009 di Tingkat SD Se-Kecamatan Balaraja”**.

Implementasi itu sendiri merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau di lihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi bagi sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah kurang paham dalam menggunakan pemanfaatan dana BOS tersebut.
2. Sering terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS hingga 2-3 bulan, terhitung dari waktu yang telah ditentukan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya yaitu Bagaimanakah tingkat Implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 di tingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian disini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi dana BOS tahun 2009 di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja sehingga dengan kita mengetahui tingkat implementasinya maka akan dapat mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan kebijakan program BOS

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa dengan adanya mata kuliah kebijakan publik ini, Penulis dapat mengetahui bahwa kebijakan itu dibuat untuk mengatasi masalah orang banyak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi dan pemecahan masalahnya. Khususnya mengenai pelaksanaan serta pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di Kecamatan Balaraja dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini diharapkan akan dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan yakni :

1. Bagi pemerintah yaitu diharapkan agar pemerintah dapat lebih optimalisasi dalam pelaksanaan program kebijakan dana bantuan operasioanal sekolah dengan melakukan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang telah dibuat tersebut.

2. Bagi Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 di Tingkat Sekolah Dasar Se- Kecamatan Balaraja” ini akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi, yang akan dibagi menjadi ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika ini secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menyajikan teori-teori yang mendasari penulisan yang berhubungan dengan pengertian implementasi kebijakan, program dana BOS serta penggambaran kerangka berpikir dan hipotesis penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai deskripsi objek penelitian mencakup lokasi penelitian, struktur organisasi dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian pada bab ini dijelaskan deskripsi data yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data. Lalu memaparkan mengenai pengujian hipotesis, interpretasi hasil penelitian, kemudian pembahasan lebih lanjut terhadap analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dilengkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Kemudian saran yang berisi rekomendasi penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori-teori yang telah ada serta hasil dan/atau pemikiran peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dimana fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu harus mengerti apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, dan bagaimana langkah-langkah untuk mengimplemnetasikannya. Dari berbagai kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yang dipahami oleh Nugroho sebagai :

“Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”.³

Kebijakan publik sebenarnya dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas, jadi “sesuatu yang mengikat dan memaksa”. Dimana berfungsi untuk memastikan setiap warga memperoleh apa yang menjadi haknya. Aturan atau peraturan tersebut secara

³ Nugroho, Riant D.2004. "*Kebijakan Publik,Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*".Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hal 3

sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Kebijakan publik merupakan denyut nadi dari proses pemerintahan. Secara sederhana kebijakan seringkali diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kewenangan untuk memastikan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik bisa tercapai. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil semestinya benar-benar mampu mewujudkan seluruh hasrat kepentingan dan tujuan-tujuan publik tersebut secara optimal.

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Cepat atau lambat kelihatannya hampir setiap *scholar* ilmu politik merasa perlu untuk mendefinisikan kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis.

Menurut Eyestone menyatakan bahwa: “Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.⁴

Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian *scholar* yang mempelajarinya. “Hubungan antar unit pemerintah dengan lingkungannya” dapat meliputi hampir

⁴ Leo Agustino, “*Politik Dan Kebijakan Publik*” (AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006) hal. 40

semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup *real* kebijakan publik yang nanti akan dibahas tidak selalu menggambarkan keluasan definisi Eyestone.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Dalam masyarakat yang terus berubah dimana masa depan tidak mungkin dapat dibaca dengan pasti, kebijakan publik menjadi solusi alternatif dari berbagai alternatif dalam menghadapi perubahan massif dan tak terkendali ke depan. Sebagai suatu proses kerja kebijakan publik terdiri atas tiga rangkaian aktivitas yang bisa digunakan secara mandiri satu persatu tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai sebuah nilai perubahan. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*...is whatever governments choose to do or not do*). Sedangkan Eyestone memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya pemerintah yang memiliki legalitas untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang kemudian diwujudkan dalam suatu pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Meski yang dikemukakan oleh Eyestone, pelibatan masyarakat dalam suatu kebijakan publik sudah nampak, namun posisinya hanya sebagai obyek. Masyarakat hanya bersifat pasif karena ia hanya menerima apa yang akan dilakukan suatu pemerintahan kepadanya.

Definisi lain mengenai kebijakan publik yaitu menurut Dye mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari definisi tersebut kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.⁵

Menurut Dye dan Anderson ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. *Pertama*, pertimbangan ilmiah yaitu kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari prosesnya, perkembangannya serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. *Kedua*, Pertimbangan profesional. *Ketiga*, Pertimbangan politis yaitu kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai dengan target. Maksudnya agar pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar.⁶ Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan masalah. Jika tidak ada suatu masalah, maka tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Porter mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor

⁵ Leo Agustino, “*Politik Dan Kebijakan Publik*” (AIPi Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006) hal. 41

⁶ Agustino, Opcit hal 41

didalamnya, khususnya aktor ekonomi. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.⁷

Dengan demikian kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama seperti yang dikemukakan di atas, untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (*Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan*) dan UUD 1945 yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut

Dengan demikian dari definisi kebijakan di atas penulis mengambil kesimpulan definisi kebijakan menurut Thomas R. Dye yaitu Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan dari definisi tersebut kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

⁷ Nugroho, Riant D.2004. "*Kebijakan Publik,Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*".Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hal 49

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Berangkat dari fokus implementasi kebijakan ini, maka muncul beberapa pertanyaan, sebagai berikut :⁸

1. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut ?
2. Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai ?
3. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan ?
4. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan ?

Empat pertanyaan di atas mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat.

⁸ Leo Agustino, "Politik Dan Kebijakan Publik" (AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006) hal. 153-154

Perlu kiranya kita sadari bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan.” Oleh karena itu guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak diharapkan) terhadap program tersebut.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fundi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Implementasi merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Metter dan Horn mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan yaitu :

“Sebuah abstraksi atau performansi suatu pengjawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”.⁹

Jadi menurut Metter dan Horn , implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yan telah digariskan dalam kebijakan.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian

⁹ Leo Agustino, *“Politik Dan Kebijakan Publik”* (AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2006) hal. 153

antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.¹⁰

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain – program, pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi

¹⁰ Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

(organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

Menurut Grindle mengemukakan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle¹¹, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*Design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya dari masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat Implementability (kemampuan pelaksanaan) kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (Isi Kebijakan) dan Context of Policy (Konteks Kebijakan).

Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

¹¹ Agustino, Opcit hal 156

Bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai pada implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Letak pengambilan keputusan

Bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

5. Pelaksana program

Bahwa dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dapat mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

6. Sumber-sumberdaya yang digunakan.

Bahwa dengan adanya sumber-sumberdaya yang mendukung, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan indikator ini sangat perlu diperhitungkan guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilannya

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana.

Setelah pelaksana kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para

pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi

Implementasi kebijakan itu menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

Dengan demikian jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan “implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku”¹²

¹² Solichin Abdul Wahab.2008. *”Pengantar Analisis Kebijakan publik”*.Malang: UMM Press. Hal 184

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil yang telah diputuskan sebelumnya. Maka dari itu implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Jadi dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan teori yang dikemukakan oleh Edwards. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, sikap dan struktur birokrasi. Ke empat faktor harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan implementasi menurut Grindle yaitu, keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability (kemampuan pelaksanaan) dari kebijakan tersebut¹³.

1. Isi kebijakan mencakup : Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber-sumberdaya yang digunakan.
2. Konteks implementasinya adalah : Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

2.4 Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kebijakan pembangunan pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan.

Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat yang kurang mampu atau penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut

¹³ Riant Nugroho. D 2004. "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi". Jakarta:PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

dapat menghambat upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, sebab penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Maka dari itu melihat permasalahan yang ada pada negara Indonesia ini, pemerintah memprogram pemberian bantuan operasional sekolah (BOS).

Dana BOS ini merupakan pengimplementasian program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM). Dibidang pendidikan ini dimulai sejak bulan juni 2005, dimana program tersebut adalah dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan. Dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan meringankan bagi siswa yang lain. Dengan adanya dana bantuan operasional sekolah ini diharapkan anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Dana Operasional Sekolah (BOS) ini bersumber atau berasal dari APBN, yang berhak memperoleh dana BOS adalah semua sekolah tingkat SD baik negeri maupun swasta diseluruh Indonesia dan semua sekolah setingkat SMP baik negeri maupun swasta diseluruh Indonesia.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun,¹⁴ setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.

¹⁴ Panduan Buku BOS hal. 9

2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.¹⁵

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk :

- a) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa-siswi baru : biaya pendaftaran, penggunaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
- b) Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi perpustakaan.
- c) Pembelian bahan-bahan habis pakai : buku tulis, kapur, pensil, bahan praktikum.
- d) Pembiayaan kegiatan kesiswaan : Program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja fasilitas sejenisnya.
- e) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

¹⁵ Ibid hal. 25 paragraf 3

- f) Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan lainnya.
- g) Pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
- h) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
- i) Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, penggandaan, surat-menyurat dan penyusunan laporan.

Kebijakan Program BOS DEPDIKNAS tahun 2009

- a) Biaya satuan BOS, termasuk BOS buku untuk siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi SD Kota Rp. 400.000,- dan Kabupaten Rp. 397.000,-
- b) Dengan Kenaikan Kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah.
- c) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional sekolah di SD swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang tidak mampu.
- d) Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.

Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari DEPDIKNAS belum mencukupi. Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2009 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
2. Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan.
3. Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah Pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS periode Oktober-Desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli-September, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah. .

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama Bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai

peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁶ yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁶ Ibid, buku panduan BOS hal 4-5

5. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
6. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
12. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2.5 Kerangka Berpikir

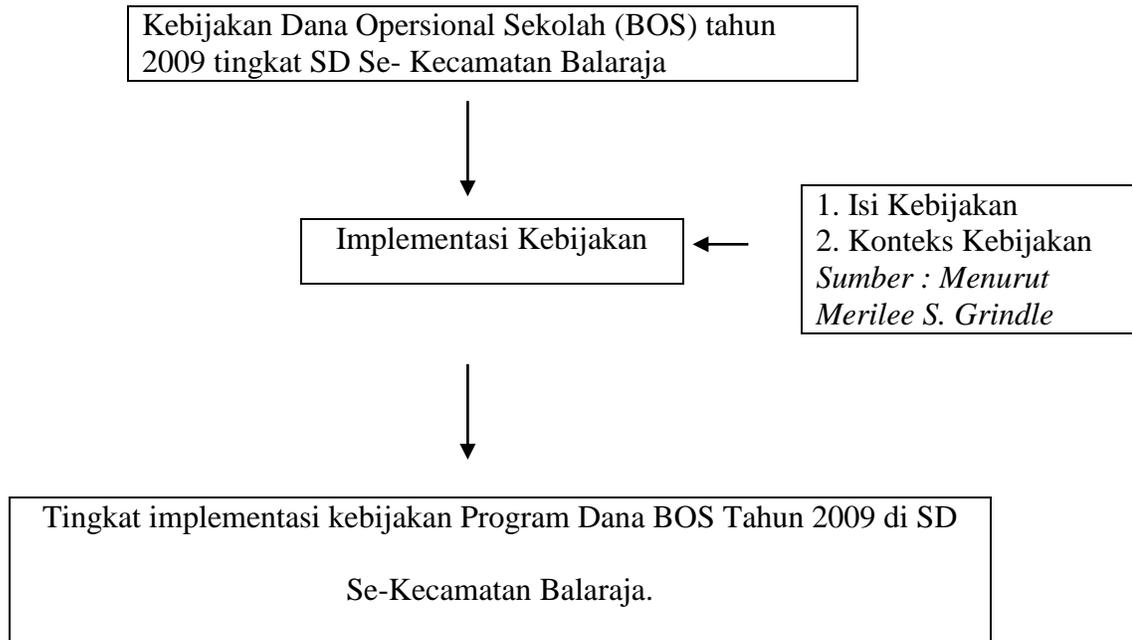
Dari uraian di atas maka terdapat variabel yaitu Implementasi yang menekankan bahwa aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Jika hasil kebijakan pada hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

Adapun pengertian implementasi adalah suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang harus tuntas, maka dana BOS ini merupakan sebagai langkah nyata pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar yang terjangkau oleh semua warga negara terutama bagi warga negara yang kurang mampu.

Maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Berpikir



2.6 Hipotesis

Setelah masalah dirumuskan maka langkah berikutnya ialah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.¹⁷

Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel.

Oleh sebab itu, peneliti membuat asumsi mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dengan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki hipotesis sebagai berikut :

Tingkat implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Di tingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009 paling tinggi mencapai 65%.

$$H_0 = \mu > 65 \%$$

$$H_a = \mu \leq 65 \%$$

¹⁷ Sarwono, jonathan. 2003. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : LPPM Universitas Komputer Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁸ Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar mengkualifikasi temuan-temuan.

Adapun dari penelitian ini dilakukan pengumpulan data yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.¹⁹

1. Pengumpulan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana sumber data primer diperoleh melalui kegiatan Penyebaran kuesioner/angket kepada responden dan observasi secara non-partisipan.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi", (Alfabeta Bandung, 2007)

¹⁹ Sonny Sumarsono.2004."Metode Riset SDM".Yogyakarta:Graha ilmu

- a. Metode Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Guna mendapat informasi yang diperlukan oleh peneliti.
 - b. Metode Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengambil langsung pada obyek penelitian sehingga diketahui keadaan sebenarnya guna memperoleh data yang valid. Dimana dalam penelitian ini, menggunakan observasi non-partisipan, maka peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat sebagai pengamat independen
2. Pengumpulan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Salah satunya yaitu Metode Dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data pendukung dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui metode literature.

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel

yang diteliti. Dalam penelitian Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah tingkat SD Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009. Peneliti menggunakan *Skala Likert*,²⁰

Tabel 3.1
Instrumen Skala Likert
Skor dalam penelitian

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2007 : 107

Berikut indikator dari variabel Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Tahun 2009 Se- Kecamatan Balaraja adalah:

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi", 2007, Hal 107

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan dana BOS di SD Se-Kecamatan Balaraja.

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
Implementasi dana BOS tahun 2009 di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja	Content of Policy(Isi Kebijakan)	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi	1,2,3
		Jenis manfaat yang akan dihasilkan	4,5,6,7
		Derajat Perubahan yang diinginkan	8,9,10
		Letak pengambilan keputusan	11,12
		Pelaksana Program	13,14,15
		Sumber-sumber daya yang digunakan	16,17,18
	Context of Policy(Konteks Kebijakan)	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	19,20
		Karakteristik lembaga dan penguasa	21,22

		Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana	23,24,25
--	--	--	----------

Sumber : Menurut Grindle (Riant, Nugroho 2004: 175)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja yang berjumlah 29 SD.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukannya untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dengan

²¹ Sugiyono, “ *Metode Penelitian Administrasi*”, 2007, hal. 90

demikian jika melihat populasi yang ada, maka peneliti mengambil sampel dilakukan dengan menggunakan Sampling Jenuh.

“Dikatakan sampling jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 29 Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja yang terdiri dari 109 responden.

Tabel 3.3

Sampel	Jumlah	Keterangan
Kepala Sekolah	29	Terdapat 7 sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang sama (merangkap). Dengan demikian dari jumlah sampel 116 – 7 kepala sekolah yang merangkap = 109 responden yang akan dijadikan sampel
Bendahara	29	
Komite	29	
Perwakilan salah satu dari orang tua siswa tiap sekolah dasar (SD)	29	
TOTAL	116	

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam pengelolaan data, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain :²²

- a. Editing merupakan kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data mentah tersebut. Editing dilakukan terhadap rekaman jawaban yang telah dituliskan dalam daftar pertanyaan oleh para pencari data dilapangan pencari data.
- b. Koding merupakan usaha untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Klasifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu, biasanya dalam bentuk angka. Di sini setiap jawaban mempunyai angka kode tersendiri. Dengan demikian nkoding berarti menetapkan kategori yang tepat bagi suatu jawaban tertentu.
- c. Tabulating. Hal ini berarti membuat tabel-tabel yang sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

²² Lihat Sonny Sumarsono.2004.*Metode Riset Sumber Daya Manusia*.Yogyakarta:Graha Ilmu

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dimana Analisis data itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, dapat digunakan dengan teknik statistik yang digunakan untuk analisis. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua, yakni data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Analisis Kuantitatif, yaitu merupakan metode ilmiah yang menjelaskan tentang data-data yang berbentuk angka yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian.
2. Analisis Kualitatif, yaitu menjelaskan hasil perhitungan penelitian dengan teori-teori yang ada.
3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, perlu dilakukan *uji t-test satu sampel* dengan menggunakan rumus :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

T = Nilai t yang dihitung

- X = Nilai rata-rata
- μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan
- s = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah anggota sampel

3.4.1 Pengujian Data

3.4.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran dengan instrumen tersebut. Validitas menunjukkan sejauhmana alat pengukur itu mengukur dan mengenai sasaran apa yang kita ukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.²³

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus product moment, sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi *product moment*

²³ Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

$\sum x$ = jumlah skor dalam sebaran X

$\sum y$ = jumlah skor dalam sebaran Y

$\sum xy$ = jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan

$\sum x^2$ = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum y^2$ = jumlah skor yang akan dikuadratkan dalam sebaran Y

n = jumlah sampel

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan seberapa besar hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi lebih dari sekali. Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*Reliable*). Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.

Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dapat diandalkan (reliabel) atau tidak. Reliabilitas (konsistensi) adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen. Reliabilitas menyangkut masalah ketepatan alat ukur. Pendekatan yang dilakukan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan reliabilitas konsistensi internal. Adapun teknik digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah *Cronbach's Alpha*, apabila dalam suatu uji

reliabilitas dihasilkan koefisien α lebih besar dari 0,6 instrumen itu dinyatakan reliable.²⁴

²⁴ Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum UPT Dinas Pendidikan. Penelitian ini bertempat pada Sekolah Dasar di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja, jalan. Raya Balaraja Kresek No Telp. (021) 5951152.

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja merupakan suatu lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja sebagai pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Dinas pendidikan mengayomi dan mengontrol Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Balaraja. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan harus berdasrakan ketentuan dari Dinas Pendidikan Tangerang, karena UPT Dinas Tangerang merupakan lembaga induk dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja.

Dalam menjalankan tugas, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja mempunyai tugas dan fungsi serta visi-misi yang telah ditetapkan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja. Sehingga dengan adanya suatu visi dan misi UPT

Dinas Pendidikan mempunyai arah dan tujuan sesuai dengan visi dan misi tersebut. Adapun tugas dan fungsi serta visi dan misi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Pendidikan

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dari Dinas Kabupaten Tangerang menyangkut bidang pendidikan.

2. Fungsi Dinas Pendidikan

- a. Sebagai pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balaraja yang menyangkut bidang pendidikan.
- b. Melakukan pembinaan kegiatan pendidikan TK,SD/MI.
- c. Pemberian pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan pendidikan di Kecamatan Balaraja.
- d. Pelaksanaan urusan umum, program, keuangan, perlengkapan, dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga dinas.
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan serta pengevaluasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.

3. Visi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja

“Terwujudnya UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja yang unggul dalam pelayanan sehingga terselenggaranya proses pendidikan dasar yang menghasilkan lulusan yang bermutu”.

4. Misi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja

- a. Mewujudkan tupoksi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja.
- b. Menciptakan budaya kerja dan iklim kerja yang kondusif dan harmonis.
- c. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dasar.
- d. Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta kemitraan dengan masyarakat.
- e. Meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan.

4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen

Pada penelitian ini, analisis data yang pertama kali dilakukan yaitu dengan melakukan uji validitas instrument. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran.

Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 109 reponden. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan suatu data tersebut diolah secara keseluruhan. Artinya, apabila sampel yang 109 didapat valid secara keseluruhan. Dalam penelitian ini rumus yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan statistik deskriptif *product moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 17.0. SPSS atau *statistika product and service system* merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan statistik menggunakan komputer.

Kelebihan program ini adalah kita dapat melakukan penghitungan secara lebih cepat, semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun, dan jika dilakukan secara manual akan memakan waktu lebih lama.

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji butir pertanyaan)

No.	Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi	R tabel	Keterangan
1.	1	0,265	0,156	Valid
2.	2	0,501	0,156	Valid
3.	3	0,556	0,156	Valid
4.	4	0,482	0,156	Valid
5.	5	0,600	0,156	Valid
6.	6	0,333	0,156	Valid
7.	7	0,279	0,156	Valid
8.	8	0,556	0,156	Valid
9.	9	0,633	0,156	Valid
10.	10	0,501	0,156	Valid
11.	11	0,556	0,156	Valid
12.	12	0,577	0,156	Valid
13.	13	0,578	0,156	Valid
14.	14	0,333	0,156	Valid
15.	15	0,501	0,156	Valid
16.	16	0,556	0,156	Valid
17.	17	0,634	0,156	Valid
18.	18	0,443	0,156	Valid
19.	19	0,651	0,156	Valid
20.	20	0,578	0,156	Valid

21.	21	0,333	0,156	Valid
22.	22	0,333	0,156	Valid
23.	23	0,501	0,156	Valid
24.	24	0,293	0,156	Valid
25.	25	0,501	0,156	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2011

Adapun kriteria pengujian item/butir yang digunakan adalah dimana jika r hitung $>$ r tabel, berarti item/butir dinyatakan valid, dan jika r hitung \leq r tabel, berarti instrumen dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua instrumen dinyatakan valid artinya instrumen tidak perlu diganti karena indikator sudah terukur dari instrumen lainnya.

4.3 Uji Reliabilitas Instrumen

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS versi 17.0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,869. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,60.

Maka hal ini dapat diartikan bahwa $0,869 > 0,60$ sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Statistik Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	25

Sumber : *data primer yang diolah, 2011*

4.4. Deskripsi Data

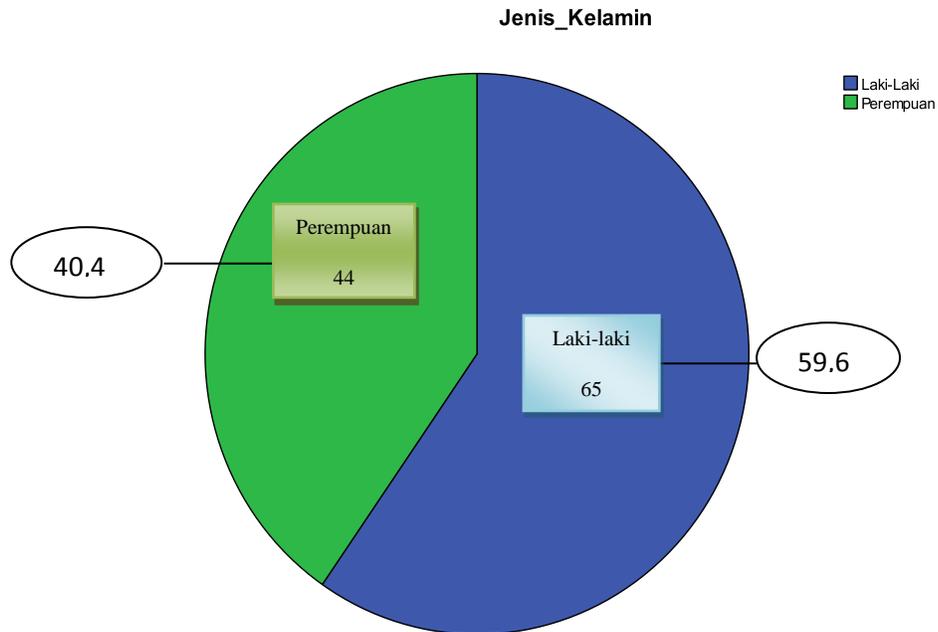
4.4.1. Identitas Responden

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Implementasi dana BOS di tingkat sekolah dasar (SD) se-kecamatan Balaraja Tahun 2009. Hal ini dilakukan guna mendapat gambaran mengenai indikator-indikator penelitian yang dijabarkan dalam daftar pertanyaan. Berikut ini disajikan data atas indikator-indikator dan pengukuran.

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah kepala sekolah dasar (SD), bendahara, komite, dan satu perwakilan dari orang tua siswa setiap sekolah, hal ini dikarenakan responden yang merasakan dari implementasi program BOS di sekolah dasar Kecamatan Balaraja. peneliti mengambil nilai rata-rata satu tahun yaitu tahun 2009 tersebut untuk dijadikan populasi

1. Jenis Kelamin

Gambar 2

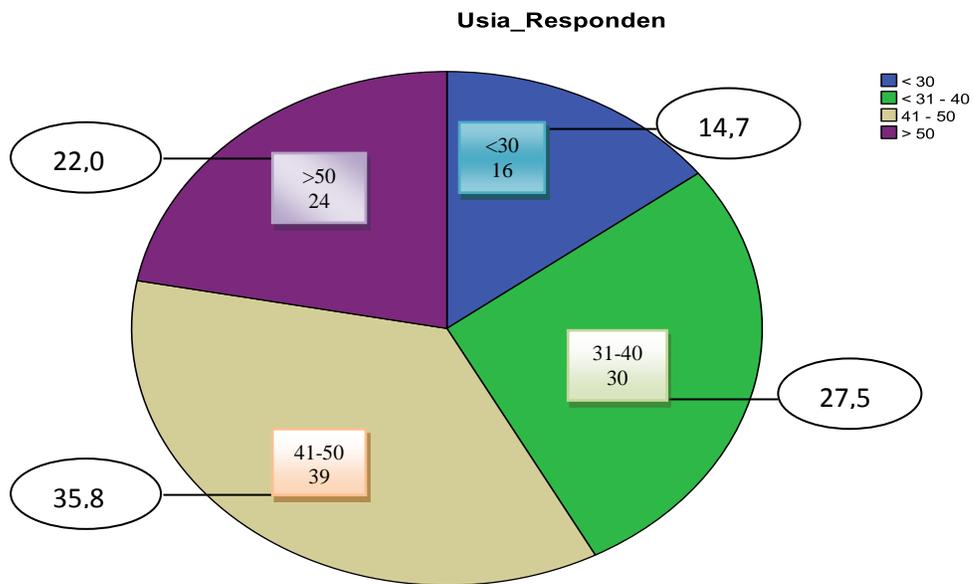


Sumber : *data primer yang diolah, 2011*

Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 65 orang (59,6%) dan sisanya 44 orang (40,4%) yaitu Perempuan. Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya beban kerja yang berat diharuskan sekolah merekrut calon guru laki-laki dan ditambah responden pada komite yang semuanya laki-laki. Dan sisanya responden perempuan yaitu kebanyakan perwakilan dari orang tua siswa yang mengantar anaknya ke sekolah.

2. Usia Responden

Gambar 3

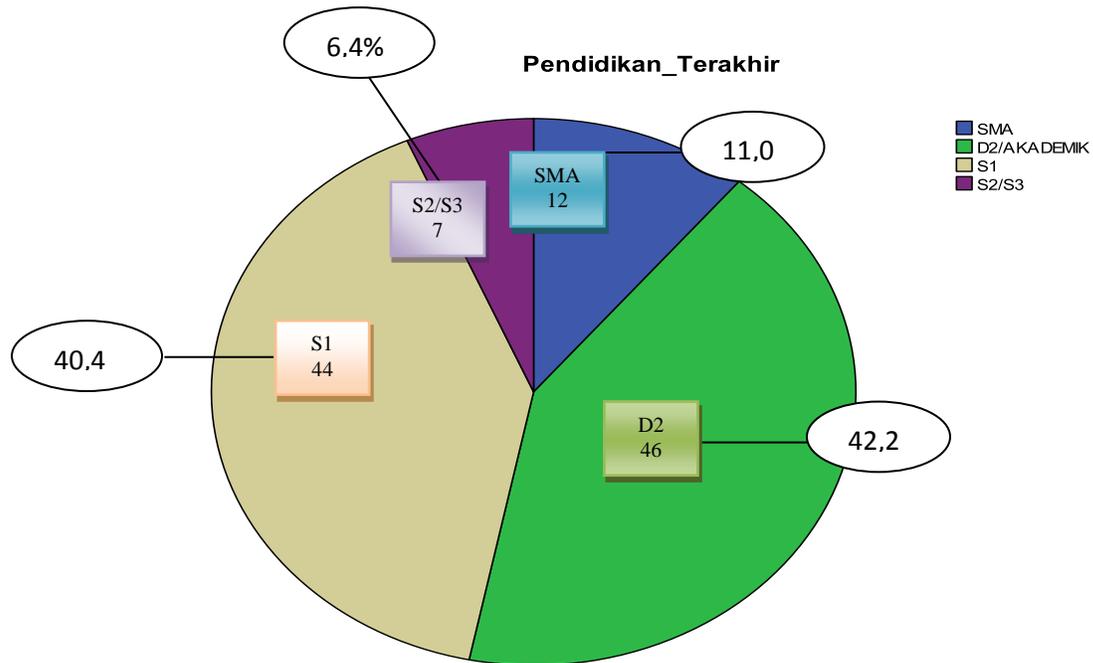


Sumber : data primer yang diolah, 2011

Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 16 orang (14,7%), untuk usia 31 – 40 tahun sebanyak 30 orang (27,5%), untuk usia 41 – 50 tahun sebanyak 39 orang (35,8%) dan sisanya untuk usia di atas 50 tahun sebanyak 24 orang (22,0%). Jumlah responden pada usia 41-50 tahun sebanyak 39 orang atau 35,8%, hal tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar yang lama.

3. Pendidikan Terakhir

Gambar 4



Sumber : data primer yang diolah, 2011

Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden yang berpendidikan lulusan SMA sebanyak 12 orang (11,0%), lulusan D2 sebanyak 46 orang (42,2%), untuk lulusan S1 sebanyak 44 orang (40,4%), untuk lulusan S2/S3 sebanyak 7 orang (6,4%). Mayoritas responden memiliki gelar D2, hal tersebut dikarenakan oleh pada profesi guru gelar yang di haruskan dimiliki oleh calon guru yaitu minimal D2, sedangkan responden yang lulusan SMA yaitu perwakilan dari orang tua siswa. Dan sisanya S1 dan S2/S3 yaitu kepala sekolah, yang merupakan tuntutan dari jabatan mereka.

4.4.2 Analisis Data

Pada analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang terlibat dalam implementasi program BOS di SD kecamatan Balaraja. Hal ini dimaksud untuk mengetahui jawaban responden mengenai bagaimana Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja. Dengan menggunakan satu variabel, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori **Grindle** maka peneliti akan menguraikan 9 (sembilan) Indikator yang terdiri dari dua dimensi yaitu: Isi kebijakan dan Konteks Kebijakan. Isi kebijakan terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu : Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, Sumber-sumber daya yang digunakan. Sedangkan Konteks kebijakan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu : Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap.

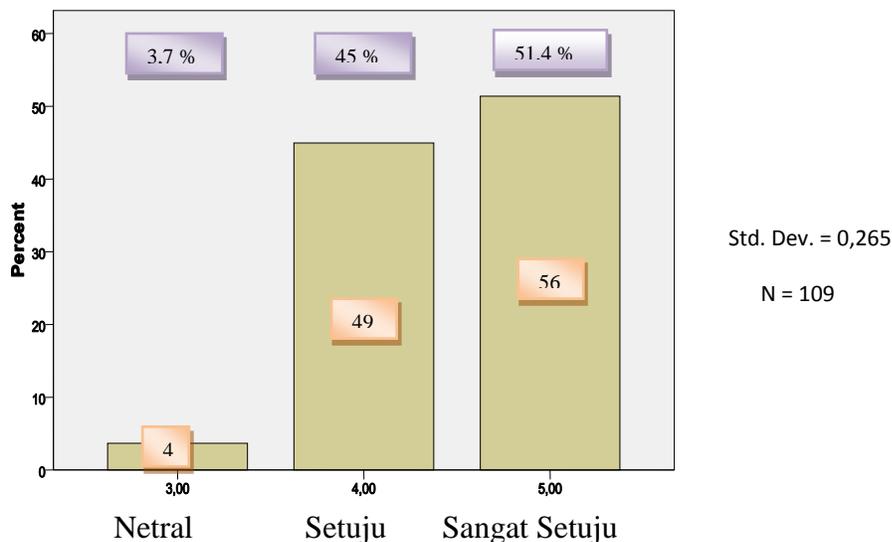
Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Pilihan jawaban dalam kuesioner yang diajukan adalah 5 item yang terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuesioner yang diajukan adalah kuesioner dalam bentuk pernyataan yang terdiri dari 25 pernyataan. Berikut adalah pemaparan hasil jawaban responden dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner.

4.4.2.1 Dimensi Pertama Isi kebijakan (*content of policy*)

Dimensi Isi kebijakan (*content of policy*) implementasi yang pertama menurut **Grindle** pada perhitungan implementasi dana BOS yang terdiri dari 6 (enam) indikator. Berikut adalah item pernyataan yang terdiri dari 18 (delapan belas) pernyataan yang diajukan kepada responden.

4.4.2.1.1 Tanggapan responden mengenai kurangnya sosialisasi mengenai dana BOS dari pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja ke Sekolah

Grafik 4.1
Kurangnya sosialisasi mengenai dana BOS dari pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja ke Sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 1)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 4 responden atau sebesar 3,7% menjawab “netral”, sebanyak 49 responden atau sebesar 45,0%

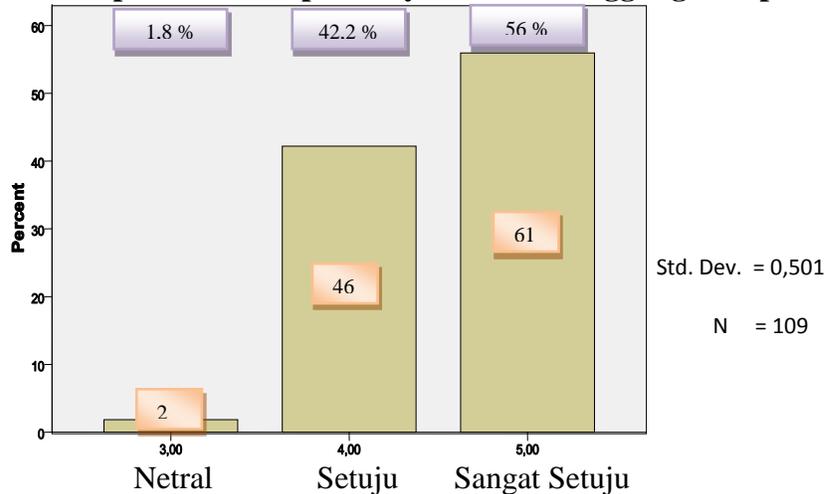
menjawab “setuju”, sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 56 responden atau 51,4 %. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan bahwa “sangat setuju” dengan pernyataan yang dibuat oleh peneliti yaitu kurangnya sosialisasi mengenai dana BOS dari pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja ke Sekolah dasar, sedangkan sebanyak 49 responden atau sebesar 45,0% menjawab “setuju” sehingga dari hasil data yang ada, maka dari itu responden masih merasakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT Dinas Pendidikan mengenai dana BOS. Sehingga mereka kurang paham akan penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk yang ada.

Dengan demikian Kebanyakan responden menilai sosialisasi sebagai tahap pelaksanaan yang paling tidak memuaskan. Penilaian tersebut akibat dari adanya anggapan bahwa sosialisasi amat sangat penting bagi keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan tahap-tahap program selanjutnya, namun pelaksanaannya terkendala oleh minimnya sumberdaya dari pihak UPTD Pendidikan untuk mensosialisasikan ke sekolah dasar sehingga mereka beranggapan bahwa sosialisasi adalah tahap terlemah dari program ini. Maka dari itu responden menginginkan pihak UPT Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi rutin, yaitu pada saat dana BOS akan diturunkan sehingga pihak sekolah akan paham penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk yang ada.

4.4.2.1.2 Tanggapan responden mengenai pendanaan pendidikan sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat

Grafik 4.2
Pendanaan pendidikan sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 2)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “netral”, sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2% menjawab “setuju”, sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 61 responden atau 56,0% menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa semua pendanaan pendidikan sepenuhnya sudah ditanggung oleh pemerintah.

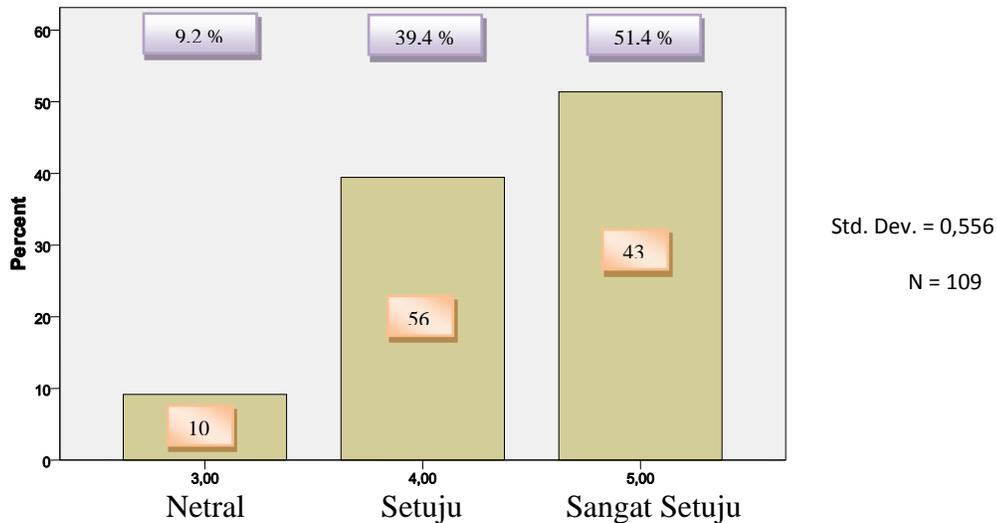
Sedangkan responden yang menyatakan “setuju” sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2%, mereka merasakan pendanaan pendidikan sudah ditanggung oleh

pemerintah pusat yaitu dengan dikeluarkannya program BOS, namun masih terdapat 2 responden atau sebesar 1,6% yang menjawab “netral”.

Dari hasil data yang ada maka dapat di ambil kesimpulan bahwa mayoritas atau lebih dominan responden merasakan pendanaan pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan pemerintah melalui program BOS, dimana program BOS ini bertujuan memberikan bantuan bagi sekolah dengan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lainnya, dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. Sebagaimana UUD RI 1945 dalam pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

4.4.2.1.3 Tanggapan responden mengenai adanya keterbukaan komite mengenai anggaran dana BOS kepada orang tua siswa

Grafik 4.3
Adanya keterbukaan komite mengenai anggaran dana BOS kepada orang tua siswa



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 3)

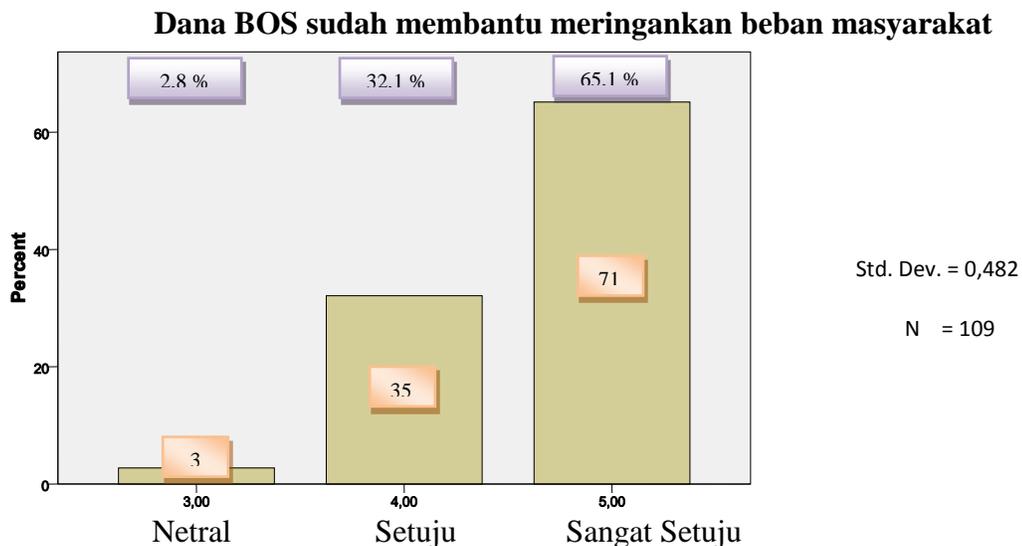
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 43 responden atau sebesar 39,4% menjawab “setuju”, sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 56 responden atau 51,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa telah adanya keterbukaan komite mengenai anggaran dana BOS kepada orang tua siswa.

Dengan demikian dari hasil data peneliti menunjukkan mayoritas menjawab sangat setuju telah adanya keterbukaan komite mengenai anggaran dana BOS pada orang tua siswa. Karena komite merupakan mitra sekolah, maka dari itu komite harus menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol dan akuntabilitas. Sehingga komite sekolah harus mengumumkan anggaran dana BOS yang digunakan untuk kebutuhan sekolah maupun siswa dipapan pengumuman maupun sosialisasi secara langsung kepada orang tua siswa.

4.4.2.1.4 Tanggapan responden mengenai dana BOS sudah membantu meringankan beban masyarakat

Grafik 4.4



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 4)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 3 responden atau sebesar 2,8% menjawab “netral”, sebanyak 35 responden atau sebesar 32,1%

menjawab “setuju”, sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1% menjawab “sangat setuju”.

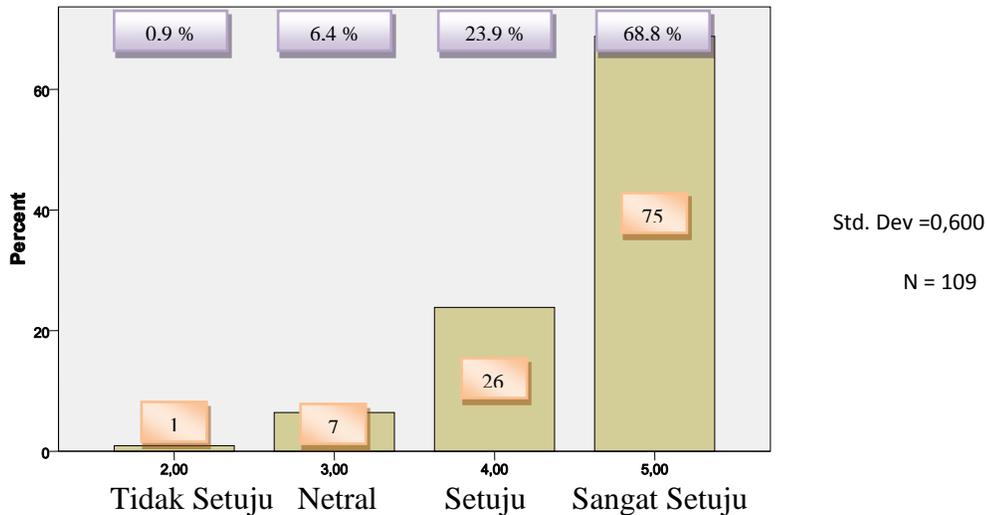
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa dana BOS sudah membantu meringankan beban masyarakat terutama bagi yang kurang mampu.

Dengan demikian dari hasil data yang ada, maka responden merasakan dengan adanya dana BOS yang di berikan oleh pemerintah yang bertujuan memprioritaskan akses pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas telah membantu masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu, dengan pemerataan BOS yang lebih luas dan merata, hal tersebut dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang sangat baik. Sehingga dana BOS sudah dapat meringankan beban masyarakat. Karena dengan adanya dana BOS, beban orang tua siswa berkurang, seperti untuk iuran SPP sudah ditanggung oleh sekolah dari dana BOS, dimana besaran SPP yang ditanggung oleh pihak sekolah tergantung pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah dasar (SD).

4.4.2.1.5 Tanggapan responden mengenai tidak adanya pungutan dalam bentuk apapun bagi siswa kurang mampu.

Grafik 4.5

Tidak adanya pungutan dalam bentuk apapun bagi siswa kurang mampu



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 5)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 1 responden atau sebesar 0,9% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% menjawab “netral”, sebanyak 26 responden atau sebesar 23,9% menjawab “setuju”, sebanyak 75 responden atau sebesar 68,8% menjawab “sangat setuju”.

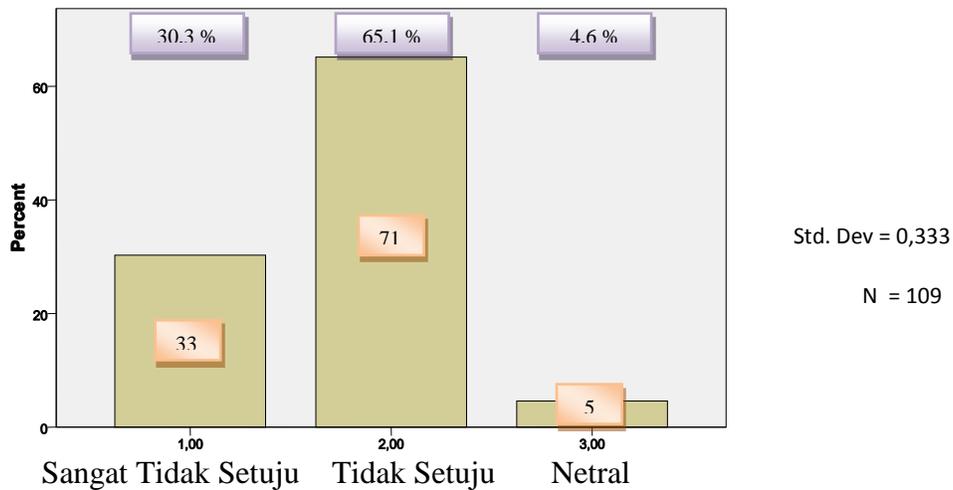
Dengan demikian dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 75 responden atau sebesar 68,8%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa tidak adanya pungutan dalam bentuk apapun bagi siswa kurang mampu. Menurut mereka bagi siswa yang kurang mampu

mendapatkan biaya tambahan dari pihak sekolah yang diambil dari dana BOS, seperti transport, alat tulis. Hal tersebut sebagaimana sudah menjadi tanggungan dari ketentuan penggunaan dana BOS. Dimana dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
2. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, karya ilmiah, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum.
4. Pembayaran bulanan guru honorer yang membantu kegiatan administrasi BOS
5. Pemberian bantuan biaya transport bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
6. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK)

4.4.2.1.6 Tanggapan responden mengenai terpenuhinya kebutuhan siswa dari dana BOS sehingga sekolah memiliki fasilitas yang lengkap

Grafik 4.6
Terpenuhinya kebutuhan siswa dari dana BOS sehingga sekolah memiliki fasilitas yang lengkap



Sumber : data primer yang diolah, 2011(Hasil Kuesioner No. 6)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3 % menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1 % menjawab tidak setuju, sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6 % menjawab “netral”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab tidak setuju yaitu sebanyak 71 responden atau 65,1 %. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “tidak setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan siswa dari dana BOS sehingga sekolah belum memiliki fasilitas yang lengkap.

Sedangkan sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% yang menjawab “netral” dan sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% yang menjawab “sangat tidak setuju”, hal ini dikarenakan responden masih merasakan bahwa belum sepenuhnya kebutuhan siswa terpenuhi dari dana BOS, sebab dalam menunjang kegiatan belajar mengajar (buku paket) pihak sekolah hanya meminjamkan sampai akhir siswa tersebut naik kelas dan pada saat itu siswa tersebut harus mengembalikan buku paket yang dipinjamkan tersebut. Sedangkan alat tulis dan peralatan lain seperti papan tulis, penghapus papan tulis, dan penggaris papan tulis yang dapat digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, dari adanya dana BOS tersebut pihak sekolah mampu menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi siswa/siswi disekolah tersebut.

4.4.2.1.7 Tanggapan responden mengenai adanya pungutan biaya LKS

Grafik 4.7



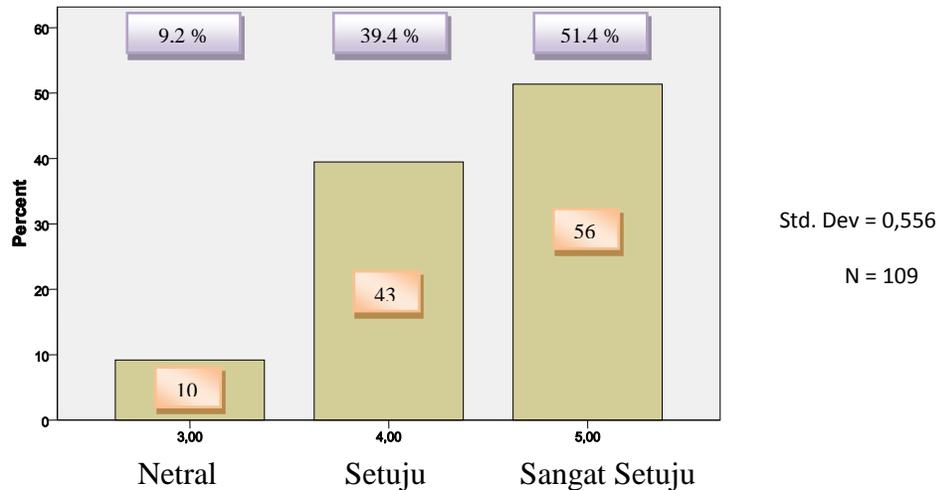
Sumber : data primer yang diolah, 2011(Hasil Kuesioner No. 7)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 3 responden atau sebesar 2,8% menjawab “netral”, sebanyak 58 responden atau sebesar 53,2% menjawab “setuju”, sebanyak 48 responden atau sebesar 44,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “setuju” yaitu sebanyak 58 responden atau 53,2 %. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa adanya pungutan biaya LKS karena untuk LKS dipungut biaya atau tidak, hal tersebut tergantung dari pihak sekolah dasar (SD). Bagi sekolah yang belum bisa membiayai pembelian LKS dengan dana BOS, dikarenakan disekolah tersebut masih terdapat banyaknya guru honorer yang menyebabkan pembiayaan pembayaran gaji guru honor meningkat dan tidak dapat menggratiskan siswa untuk pembelian LKS. Sehingga siswa pun dikenakan biaya untuk pembelian LKS.

4.4.2.1.8 Tanggapan responden mengenai sekolah sudah menjamin siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang SMP

Grafik 4.8
Sekolah sudah menjamin siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang SMP



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 8)

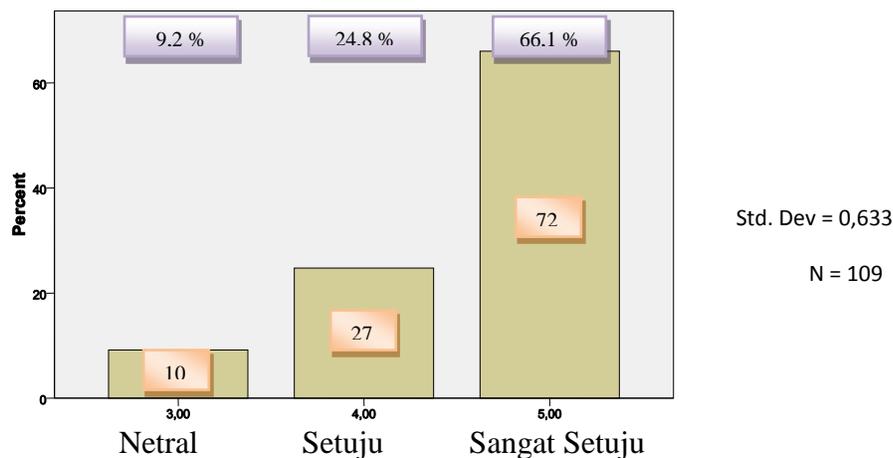
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 43 responden atau sebesar 39,4% menjawab “setuju”, sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 56 responden atau 51,4 %. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa sekolah sudah menjamin siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Hal ini dikarenakan dengan adanya program BOS, kebutuhan siswa di sekolah dasar telah

terpenuhi dan dapat meringankan beban mereka. Sebab biaya yang tadinya dibebankan kepada orang tua siswa melalui iuran sekolah atau SPP, kini tidak lagi menjadi beban orang tua siswa. Sehingga orang tua siswa pun dapat menabung untuk keperluan anaknya menempuh kejenjang yang lebih tinggi yaitu melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP).

4.4.2.1.9 Tanggapan responden mengenai adanya timbal balik masyarakat terhadap pelaksanaan program BOS

Grafik 4.9
Adanya timbal balik masyarakat terhadap pelaksanaan program BOS

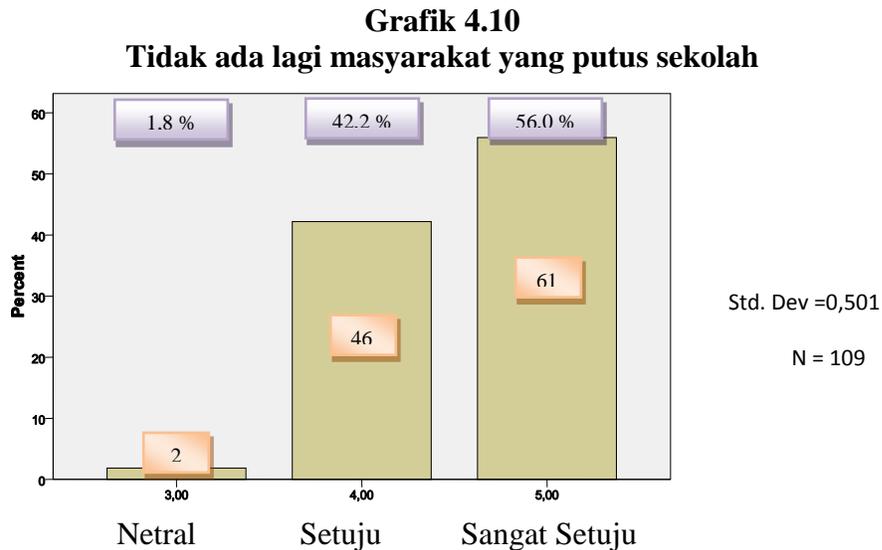


Sumber : data primer yang diolah, 2011(Hasil Kuesioner No. 9)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 27 responden atau sebesar 24,8% menjawab “setuju”, sebanyak 72 responden atau sebesar 66,1% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 72 responden atau sebesar 66,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa telah adanya timbal balik masyarakat terhadap pelaksanaan program BOS. Dimana masyarakat menilai bahwa dengan adanya program BOS ini, masyarakat pun merasa bahwa pencapaian pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh masyarakat dari golongan manapun, baik golongan atas, sedang, bawah serta program BOS memberikan manfaat yang baik. Baik untuk sekolah maupun kebutuhan kegiatan belajar-mengajar siswa. Maka dari itu dengan tujuan program BOS yang baik, menghasilkan timbal balik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumbangan yang diberikan dari orang tua siswa kepada sekolah yaitu berupa dana sukarela atau perabotan sekolah seperti sapu, penghapus papan tulis dan sebagainya.

4.4.2.1.10 Tanggapan responden mengenai tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011(Hasil Kuesioner No. 10)

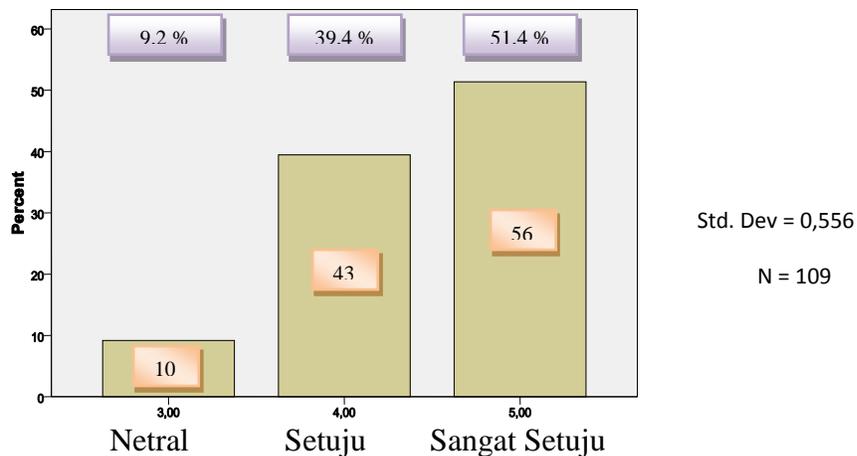
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “netral”, sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2% menjawab “setuju”, sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah. Maka dari itu, dari hasil data melalui kuesioner dan wawancara, responden merasakan bahwa di daerah Kecamatan Balaraja sudah tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Hal

tersebut dikarenakan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu sudah dapat bersekolah dan merasakan sebagaimana mestinya pendidikan yang diberikan tanpa membeda-bedakan golongan. dimana hal tersebut didukung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, untuk mengatasi angka putus sekolah sehingga pemerintah memberikan dana pendidikan yaitu melalui program dana BOS yang bertujuan memprioritaskan akses pendidikan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas.

4.4.2.1.11 Tanggapan responden mengenai pelaksanaan perwujudan tujuan dana BOS sudah mampu membuat akses pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk dapat melaksanakan pendidikan formal

Grafik 4.11
Pelaksanaan perwujudan tujuan dana BOS sudah mampu membuat akses pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk dapat melaksanakan pendidikan formal



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 11)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 43 responden atau sebesar 39,4%

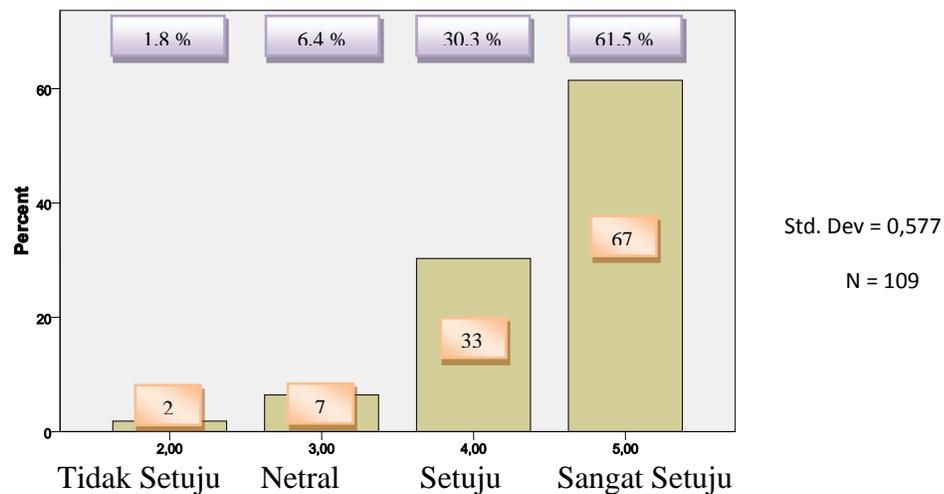
menjawab “setuju”, sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa pelaksanaan perwujudan tujuan dana BOS sudah mampu membuat akses pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk dapat melaksanakan pendidikan formal.

Sedangkan sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral” dan sebanyak 43 responden atau sebesar 39,4% yang menjawab “setuju”. Dengan demikian mereka juga merasakan bahwa siswa yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan formal sebagaimana siswa yang lain. Maka dari itu, perwujudan tujuan dana BOS telah mampu memberikan kontribusi yang baik bagi siswa-siswi yang mampu maupun yang kurang mampu untuk dapat merasakan pendidikan formal. Sebagaimana tertulis dalam UUD RI 1945 pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

4.4.2.1.12 Tanggapan responden mengenai Pendataan tentang penetapan sasaran dana BOS telah dirapatkan oleh kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite

Grafik 4.12
Pendataan tentang penetapan sasaran dana BOS telah dirapatkan oleh kepala sekolah, bendahara, komite dan perwakilan salah satu orang tua siswa



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 12)

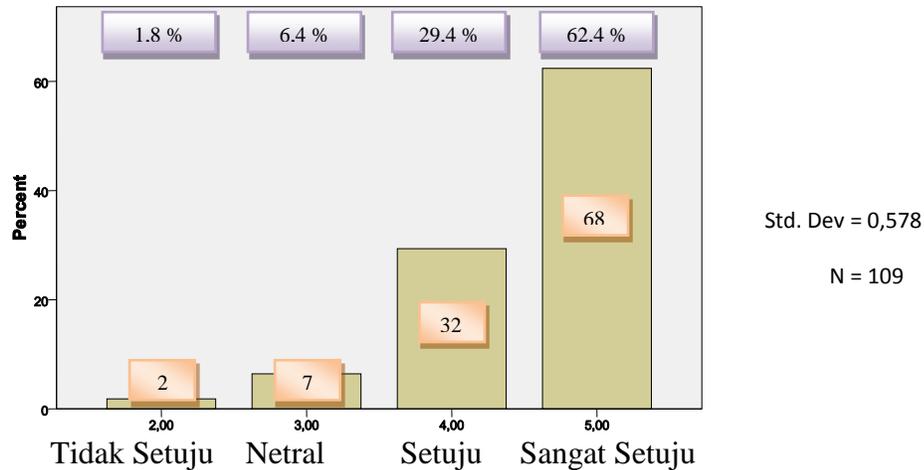
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% menjawab “netral”, sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% menjawab “setuju”, sebanyak 67 responden atau sebesar 61,5% menjawab “sangat setuju”.

Dengan demikian dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 67 responden atau 61,5%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa Pendataan tentang penetapan sasaran dana BOS telah dirapatkan oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite. Pendataan tentang

penetapan sasaran penerima dana BOS harus dirapatkan setiap dana BOS itu akan turun, hal tersebut dikarenakan oleh jumlah siswa/siswi disetiap sekolah penerima dana BOS, terkadang ada beberapa siswa/siswi yang pindah ke sekolah lain atau ke daerah lain yang diharuskan ikut orang tuanya mutasi kerja ke daerah lain. Maka dari itu, pendataan tentang penetapan sasaran dana BOS itu harus dirapatkan oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sangat penting dilaksanakan.

4.4.2.1.13 Tanggapan responden mengenai kepala sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabilitas

Grafik 4.13
Kepala sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabilitas



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 13)

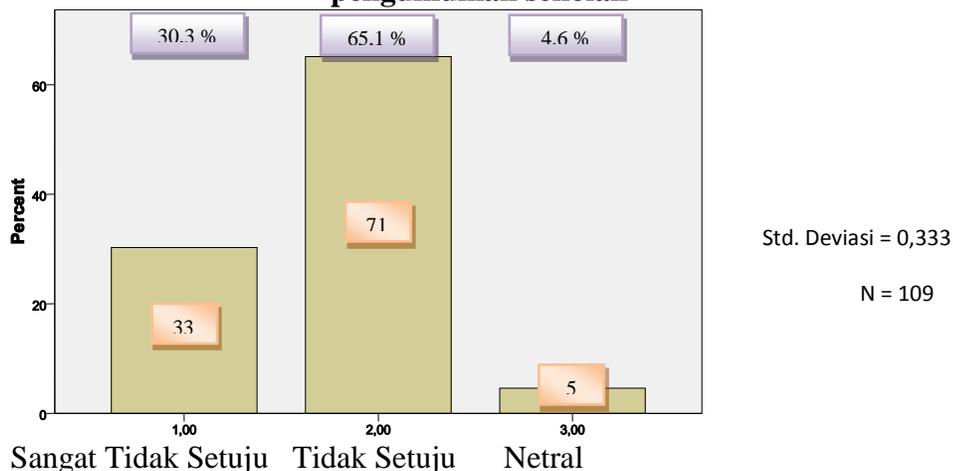
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% menjawab “netral”, sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% menjawab “setuju”, sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa kepala sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabilitas. Salah satunya sudah dibuktikan dipapan pengumuman sekolah, mengenai semua anggaran yang didapat dan dipergunakan untuk keperluan sekolah

maupun kebutuhan siswa. Selain itu pengawasan pun selalu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dana BOS. Dengan demikian jelas bahwa kepala sekolah telah mampu mengelola dana BOS dengan transparan dan akuntabilitas.

4.4.2.1.14 Tanggapan responden mengenai sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola dipapan pengumuman sekolah

Grafik 4.14
Sekolah tidak mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola di papan pengumuman sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 14)

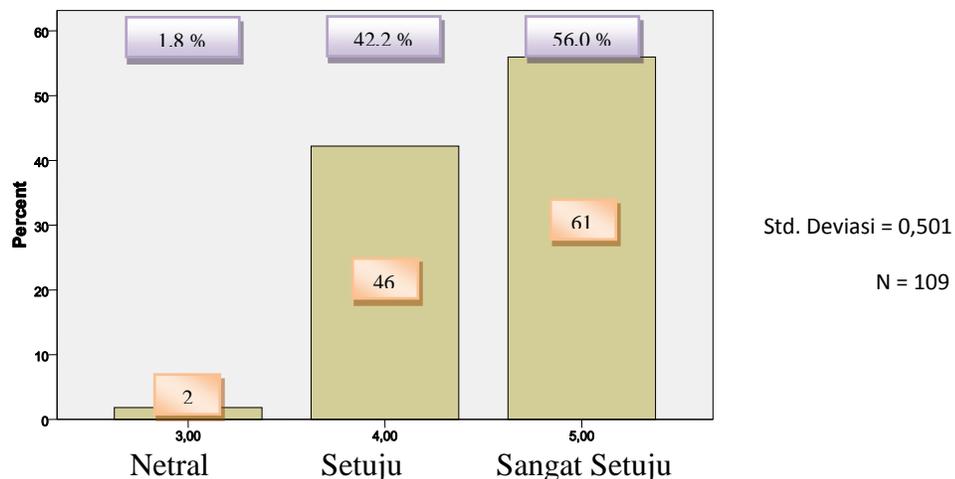
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% menjawab “sangat tidak setuju”, sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% menjawab “netral”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “tidak setuju” yaitu sebanyak 71 responden atau 65,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “tidak

setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa sekolah sudah mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola dipapan pengumuman sekolah. karena mereka merasa telah mengumumkan semua yang menyangkut perkembangan dana BOS dipapan pengumuman sekolah. Hal ini dilakukan oleh pihak sekolah agar tidak terjadi kesenjangan antar pihak sekolah dengan orang tua siswa. Sehingga orang tua siswa pun tahu akan penggunaan apa saja yang dipakai dari dana BOS.

4.4.2.1.15 Tanggapan responden mengenai adanya masyarakat yang memberikan dana sukarela kepada sekolah

Grafik 4.15
Adanya masyarakat yang memberikan dana sukarela kepada sekolah



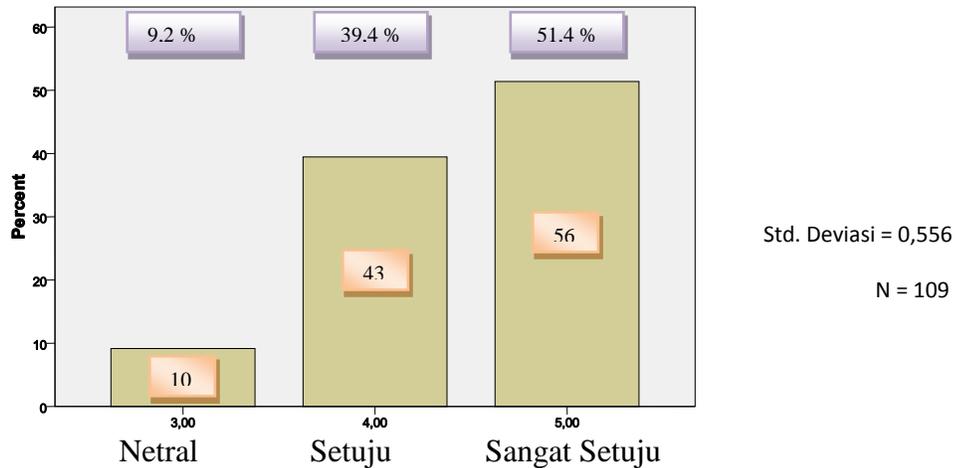
Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 15)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “netral”, sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2% menjawab “setuju”, sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0 %. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa adamasyarakat yang memberikan dana sukarela kepada sekolah. Hal ini merupakan wujud kepedulian masyarakat, dimana masyarakat ingin turut serta dalam kemajuan pendidikan, sehingga masyarakat ingin berpartisipasi langsung dalam pendanaan kepada pihak sekolah atau disebut dengan dana sukarela. Wujud partisipasi masyarakat ini antara lain memberikan sumbangan baik secara rutin (perbulan) maupun setiap tahun ajaran baru. Dengan demikian, kebanyakan responden menyatakan bahwa ada masyarakat yang mau memberikan dana sukarela kepada sekolah dasar di Kecamatan Balaraja.

4.4.2.1.16 Tanggapan responden mengenai adanya pengawasan pelaksanaan dana BOS dari UPT Dinas pendidikan

Grafik 4.16
Adanya pengawasan pelaksanaan dana BOS dari UPT Dinas pendidikan



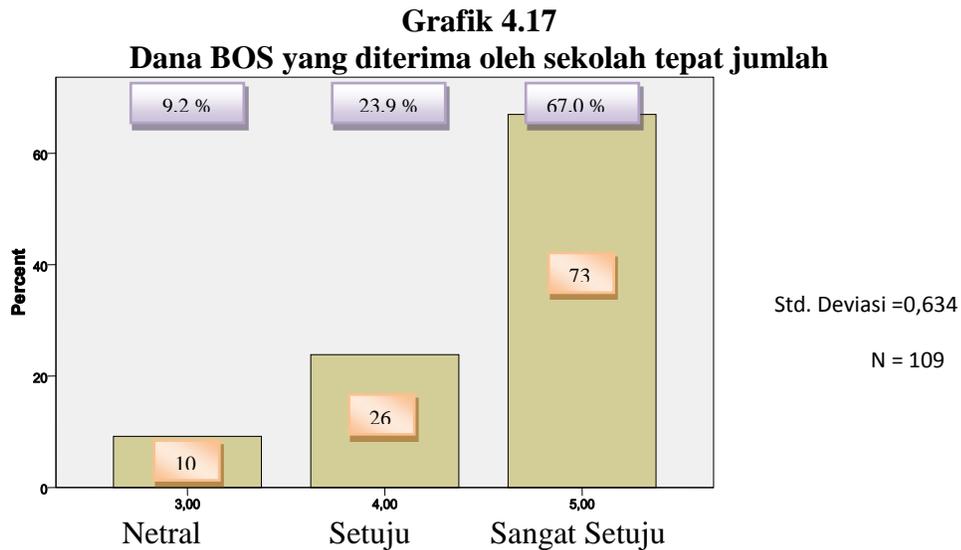
Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 16)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 43 responden atau sebesar 39,4% menjawab “setuju”, sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 56 responden atau sebesar 51,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa pengawasan pelaksanaan dana BOS telah dilakukan oleh UPT Dinas pendidikan Kecamatan Balaraja. karena disetiap gugus sekolah sudah ada pengawas yang dikerahkan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja.

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terindikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, agar dapat segera dilaporkan kepada instansi pengawasan fungsional (Bawasda). Dengan demikian bahwa mayoritas responden telah merasakan adanya pengawasan pelaksanaan dana BOS dari pihak UPT Dinas Kecamatan Balaraja dan pengawasan tersebut selalu dilakukan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan program BOS dilakukan atau dilaksanakan. Salah satunya yaitu pada saat penerimaan murid atau siswa baru.

4.4.2.1.17 Tanggapan responden mengenai dana BOS yang diterima oleh sekolah tepat jumlah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 17)

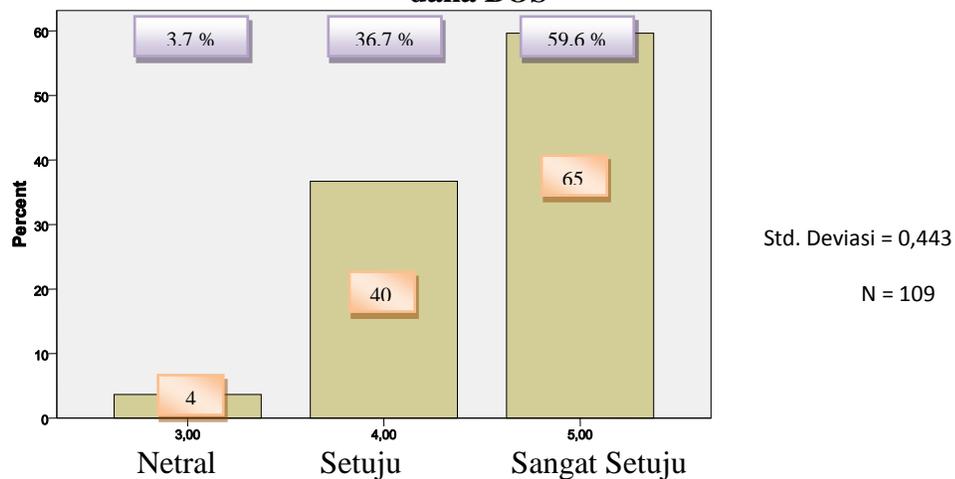
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 10 responden atau sebesar 9,2% menjawab “netral”, sebanyak 26 responden atau sebesar 23,9% menjawab “setuju”, sebanyak 73 responden atau sebesar 67,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 73 responden atau sebesar 67,0%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah tepat jumlah. Karena jumlah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan jumlah setiap siswadi setiap sekolah dasar di Kecamatan Balaraja. Dimana dana yang

diberikan tiap anak atau siswa sebesar Rp. 397.000 per tahun. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah sudah tepat jumlah. Karena dana BOS dicairkan melalui kantor POS, dan dalam pengambilan dana tersebut hanya kepala sekolah dan bendahara yang dapat mencairkan dana tersebut. Jadi tidak akan ada pengurangan jumlah uang yang diterima oleh sekolah. Dan untuk tim manajemen program BOS pun tak diperkenankan melakukan pemungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah.

4.4.2.1.18 Tanggapan responden mengenai Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang mengenai penggunaan dana BOS

Grafik 4.18
Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang mengenai penggunaan dana BOS



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 18)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 4 responden atau sebesar 3,7% menjawab “netral”, sebanyak 40 responden atau sebesar 36,7%

menjawab “setuju”, sebanyak 65 responden atau sebesar 59,6% menjawab “sangat setuju”.

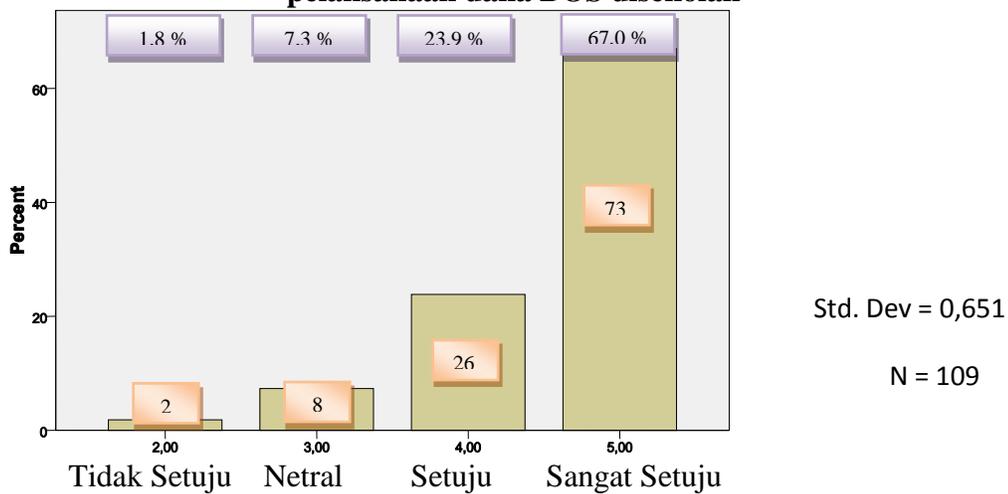
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 65 responden atau sebesar 59,6%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang mengenai penggunaan dana BOS. Karena pemeriksaan ini keharusan sekolah untuk mau diaudit akan penggunaan dana BOS. Dimana audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangannya yaitu dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS , hal tersebut dilakukan agar penggunaan dana BOS tersebut tepat dalam penggunaannya.

4.4.2.2 Konteks Kebijakan (*context policy*)

Dimensi konteks kebijakan (*context policy*) implementasi yang kedua menurut Grindle pada perhitungan implementasi yang terdiri dari 3 (tiga) indikator. Berikut adalah item pernyataan yang terdiri dari 7 (tujuh) pertanyaan yang diajukan kepada responden.

4.4.2.2.1 Tanggapan responden mengenai adanya kesatuan informasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah

Grafik 4.19
Adanya kesatuan informasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 19)

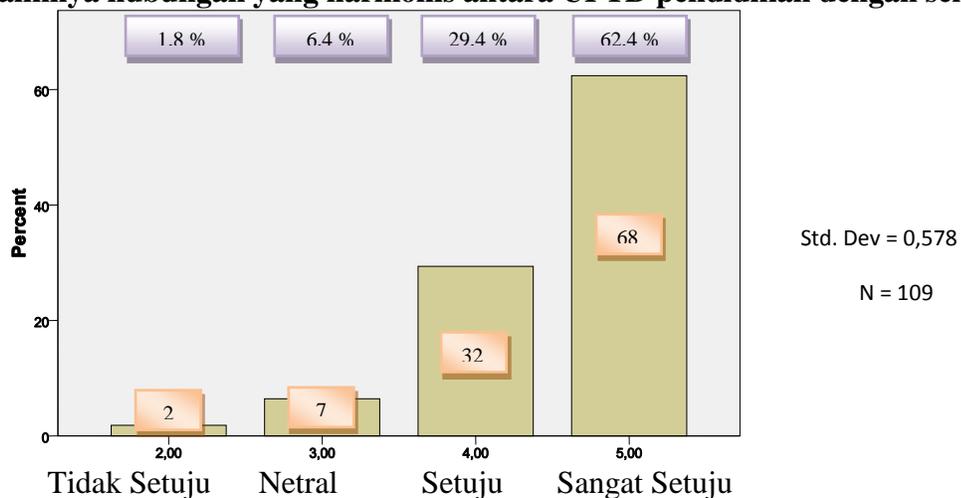
Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden 1,8 % menjawab “tidak setuju”, sebanyak 8 atau sebesar 7,3% menjawab “netral”, sebanyak 26 responden atau sebesar 23,9% menjawab “setuju”, sebanyak 73 responden atau sebesar 67,0% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 73 responden atau sebesar 67,0%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa adanya kesatuan informasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah. yaitu antara kepala sekolah, bendahara dan komite. Mereka saling memberikan informasi yang terkait dengan dana BOS, sehingga menunjang keberhasilan dana BOS di sekolah dasar tersebut.

4.4.2.2 Tanggapan responden mengenai terjalinnya hubungan yang harmonis antara UPTD pendidikan dengan sekolah

Grafik 4.20

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara UPTD pendidikan dengan sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 20)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau 1,8% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% menjawab “netral”, sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% menjawab “setuju”, sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4% menjawab “sangat setuju”.

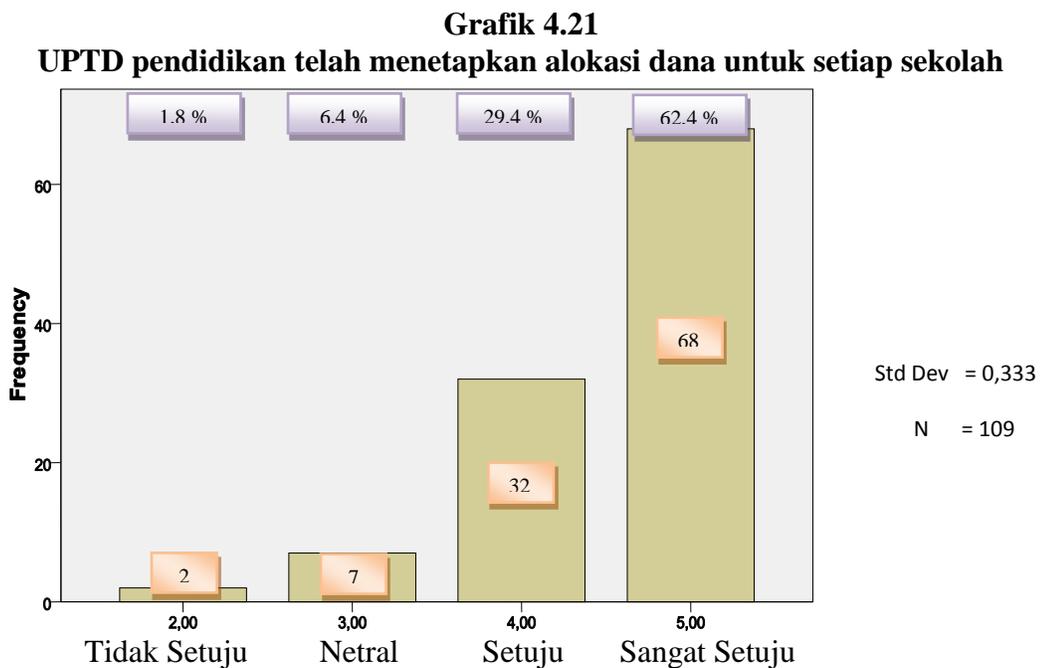
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis antara UPTD pendidikan dengan sekolah.

Sedangkan sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% yang menjawab “netral” dan sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% yang menjawab “tidak setuju”. Hal ini berarti masih ada responden yang merasakan hubungan yang harmonis belumlah terjalin antara UPT Dinas Pendidikan dengan sekolah. Meskipun demikian, sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% yang menjawab “setuju”, hal ini dikarenakan responden merasakan bahwa sudah terjalinnya hubungan yang harmonis antara UPT Dinas Pendidikan dengan sekolah.

Meskipun demikian mayoritas responden menjawab sangat setuju atau sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4%. Hal tersebut menunjukkan responden merasakan bahwa sudah terjalinnya hubungan yang harmonis antara UPT Dinas Pendidikan dengan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota guru honor yang

semakin meningkat, guru honor tersebut diajukan oleh pihak sekolah ke UPT Dinas Pendidikan Balaraja. Pihak UPT pun dapat menerima guru honor tersebut, dan menghasilkan hubungan yang harmonis antara pihak UPT dan sekolah. Sedangkan pembiayaan guru honor diambil dari dana BOS. yang dimisalkan guru honor tersebut memegang salah satu ekstrakurikuler pramuka, itu yang dimaksud dalam pembiayaan guru honor.

4.4.2.2.3 Tanggapan responden mengenai UPTD pendidikan telah menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 21)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4%

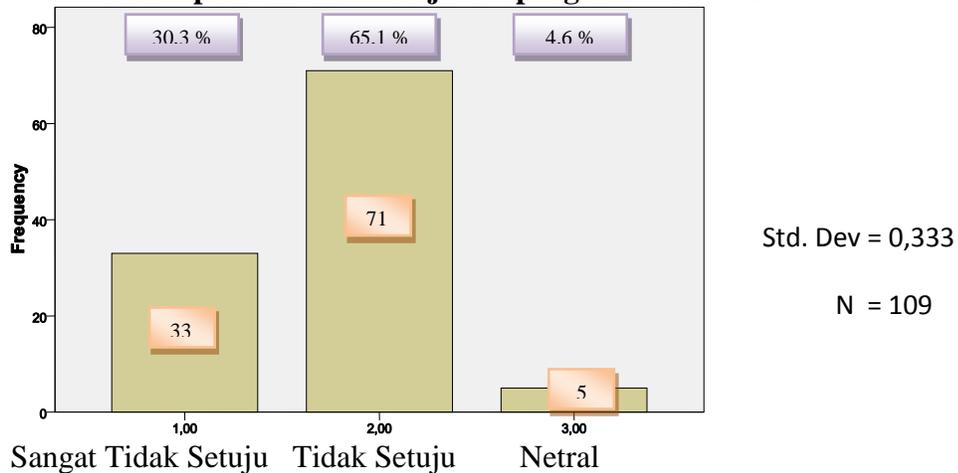
menjawab “netral”, sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% menjawab “setuju”, sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4% menjawab “sangat setuju”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 68 responden atau sebesar 62,4%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa UPTD pendidikan telah menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.

Sedangkan sebanyak 7 responden atau sebesar 6,4% yang menjawab “netral” dan sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% yang menjawab “tidak setuju”. Hal ini dikarenakan responden merasakan UPT Dinas Pendidikan belum menentukan alokasi dana untuk setiap sekolah, walaupun demikian sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% yang menjawab “setuju”, karena mereka berpendapat bahwa alokasi dana telah ditetapkan oleh UPT Dinas Pendidikan di Balaraja. Penetapan dana di setiap sekolah merupakan tugas dan kewajiban dari UPT Dinas Pendidikan sebagai tim manajemen Kabupaten dalam pelaksanaan program BOS untuk sekolah dasar se-Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Dimana jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid yang ada di masing-masing sekolah dasar. Dalam menentukan jumlah murid yang ada di setiap sekolah, pihak UPTD Pendidikan se-Kecamatan Balaraja melakukan pencarian data secara langsung ke masing-masing sekolah untuk mengetahui besaran jumlah yang akan dicairkan tersebut.

4.4.2.2.4 Tanggapan responden mengenai adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program BOS di Sekolah

Grafik 4.22
Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program BOS di Sekolah



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 22)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% menjawab “sangat tidak setuju”, sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% menjawab “netral”.

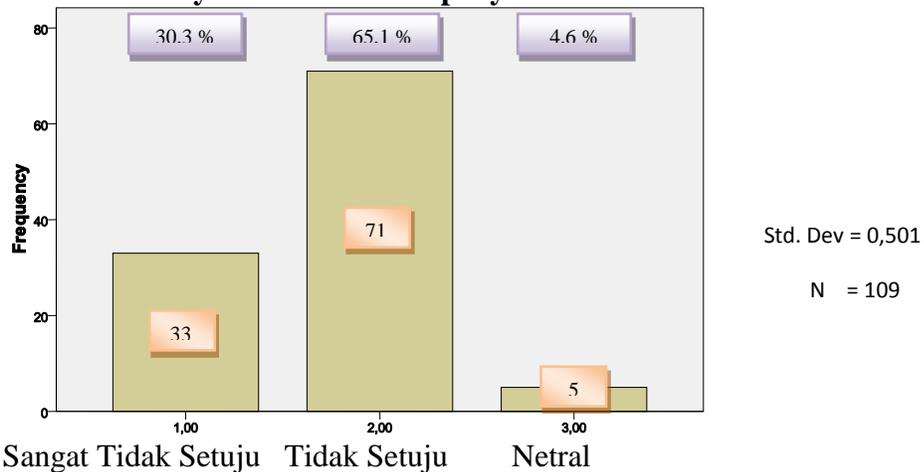
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “tidak setuju” yaitu sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “tidak setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa dalam pelaksanaan program BOS di sekolah dasar tidak

terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi pihak-pihak pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program BOS di Sekolah.

Sedangkan sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% yang menjawab “netral” dan sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% yang menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini dikarenakan mereka merasakan bahwa dalam menjalankan tugas mengenai pelaksanaan program BOS tidak terjadi tumpang tindih. Karena masing-masing anggota yang terlibat dalam program BOS telah mempunyai tugas dan kewajiban. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dalam menjalankan program implementasi dana BOS.

4.4.2.2.5 Tanggapan responden mengenai sudah tidak adanya keterlambatan penyaluran dana BOS di sekolah dasar

Grafik 4.23
Sudah tidak adanya keterlambatan penyaluran dana BOS di sekolah dasar



Sumber : data primer yang diolah, 2011(Hasil Kuesioner No. 23)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% menjawab “sangat tidak setuju”, sebanyak 71 atau sebesar 65,1% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% menjawab “netral”.

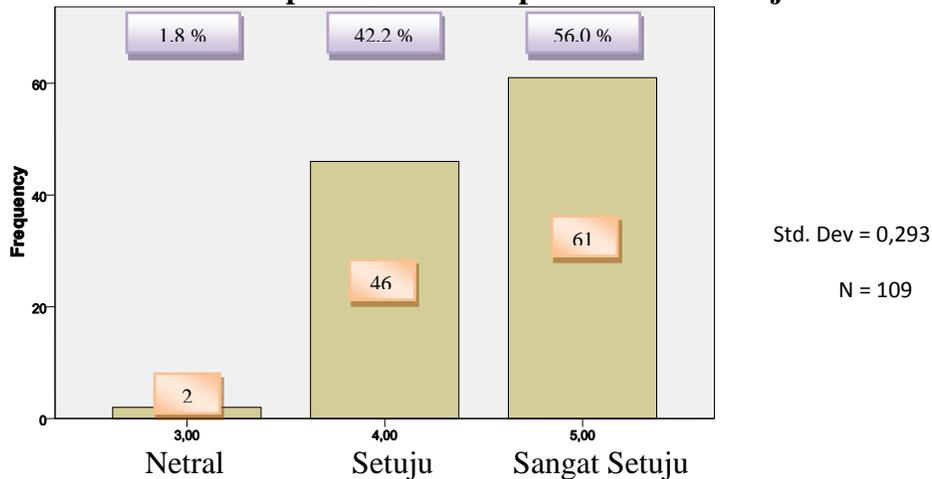
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “tidak setuju” yaitu sebanyak 71 responden atau sebesar 65,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “tidak setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa masih adanya keterlambatan penyaluran dana BOS di sekolah dasar.

Sedangkan sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% yang menjawab “netral” dan sebanyak 33 responden atau sebesar 30,3% yang menjawab “sangat tidak setuju”. Hal ini dikarenakan responden masih merasakan bahwa penyaluran dana BOS masih sering terlambat, dimana keterlambatan dalam penyaluran dana BOS bisa mencapai 2-3 bulan. Hal tersebut disebabkan kurangnya ketepatan pihak sekolah dalam menyerahkan surat pertanggung jawaban (SPJ) dan tim manajemen BOS yang memperlambat turunnya dana BOS.

4.4.2.2.6 Tanggapan responden mengenai kurang ketepatan sekolah menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada UPT Dinas pendidikan Balaraja

Grafik 4.24

Kurang ketepatan sekolah menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada UPT Dinas pendidikan Balaraja



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 24)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% menjawab “netral”, sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2% menjawab “setuju”, sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0% menjawab “sangat setuju”.

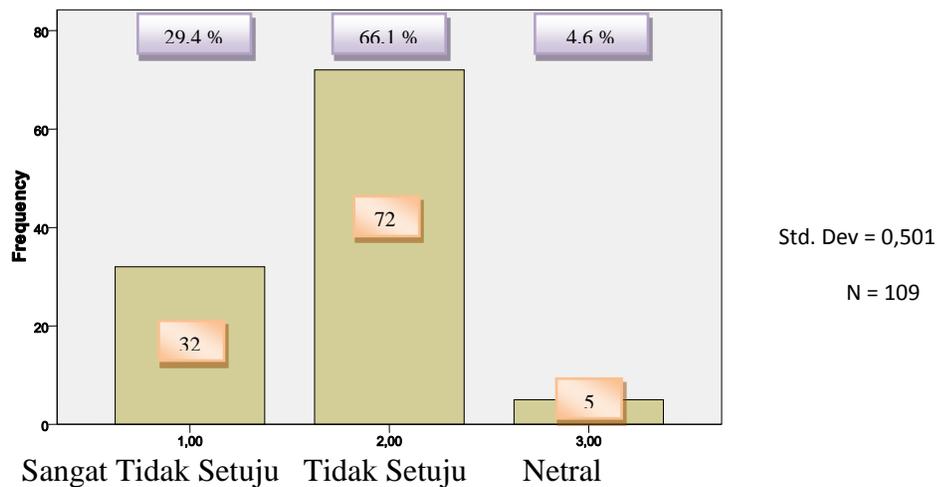
Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 61 responden atau sebesar 56,0%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “sangat setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa kurang ketepatan sekolah menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada UPT Dinas pendidikan Balaraja.

Sedangkan sebanyak 2 responden atau sebesar 1,8% yang menjawab “netral” dan sebanyak 46 responden atau sebesar 42,2% yang menjawab “setuju”. Hal ini dikarenakan responden masih merasakan bahwa kurang ketepatan sekolah

menyerahkan SPJ (surat pertanggung jawaban) kepada UPT Dinas pendidikan Balaraja. Hal tersebut disebabkan karena sekolah belum paham terhadap penggunaan dana BOS. Sehingga menyebabkan pihak sekolah yang sering terlambat dalam menyelesaikan atau menyerahkan surat pertanggung jawaban ke UPT Dinas Pendidikan.

4.4.2.7 Tanggapan responden mengenai pihak sekolah atau guru sudah menguasai pengetahuan mengenai penggunaan dana BOS

Grafik 4.25
Pihak sekolah atau guru sudah menguasai pengetahuan mengenai penggunaan dana BOS



Sumber : data primer yang diolah, 2011 (Hasil Kuesioner No. 25)

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa sebanyak 32 responden atau sebesar 29,4% menjawab “sangat tidak setuju”, sebanyak 72 responden atau sebesar 66,1% menjawab “tidak setuju”, sebanyak 5 responden atau sebesar 4,6% menjawab “netral”.

Dari hasil data penelitian menunjukkan mayoritas responden yang menjawab “sangat setuju” yaitu sebanyak 72 responden atau sebesar 66,1%. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, mereka menyatakan “tidak setuju” dengan pernyataan yang di buat oleh peneliti yaitu responden merasakan bahwa pihak sekolah atau guru masih banyak yang belum menguasai pengetahuan mengenai penggunaan dana BOS. Hal ini dikarenakan responden merasakan bahwa pihak sekolah atau guru masih banyak yang belum menguasai pengetahuan mengenai penggunaan dana BOS. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang kurang, sehingga menyebabkan *stakeholder* yaitu guru tidak mendapatkan informasi secara langsung dari UPT Dinas Pendidikan. Akibatnya kurangnya pengetahuan dewan guru tentang implementasi dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak).

4.5 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dijawab melalui hipotesis yang dihitung dari data yang terkumpul. Pengujian statistik disini dimaksudkan untuk melakukan pengujian yang telah diduga, dalam pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan rumus *t-test satu sampel*. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai hipotesis:

Ha : $\mu > 65\%$

Ha : Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Balaraja paling tinggi 65%.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, perhitungan pengujian hipotesis yakni sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh $5 \times 25 \times 109 = 13.625$. Jumlah skor yang diperoleh melalui pengumpulan data yaitu sebesar 10762 (Grafik pada daftar lampiran) jadi nilai Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja = $10.762 : 13.625 = 0,789$ atau 78,9 % dari yang diharapkan. Dari skor tersebut, maka rata-ratanya adalah $13.625 : 109 = 125$ maka pengujian ini didasarkan pada uji satu pihak kiri. Implementasi dana BOS di tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Balaraja, nilai yang dihipotesiskan yaitu paling tinggi 65 % dari nilai ideal, ini berarti bahwa $0,65 \times 13.625 : 109 = 81,25$. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$H_0 = \mu > 65\% > 0,65 \times 13.625 : 109 = 81,25$$

$$H_a = \mu \leq 65\% \leq 0,65 \times 13.625 : 109 = 81,25$$

H_a = Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah

Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja Paling tinggi 65%

Tabel 4.3

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
IMPLEMENTASI	109	98.7339	7.15133	.68497

Diketahui :

$$X = \sum X : n = 10762 : 109 = 98,7339$$

$$\mu_0 = 65\% = 0,65 \times 13.625 : 109 = 81,25$$

$$S = 7,15133$$

$$n = 109$$

Jawab :

$$T = \frac{x - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$$= \frac{98,7339 - 81,25}{\frac{7,15133}{10,44}}$$

$$= \frac{17,4839}{0,68497}$$

$$T = 25,525$$

Tabel 4.4
Statistik t-test satu sampel

	Test Value = 65					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
IMPLEMENTASI	25.525	108	.000	33.73394	32.3762	35.0917

Sumber : data primer yang diolah, 2011.

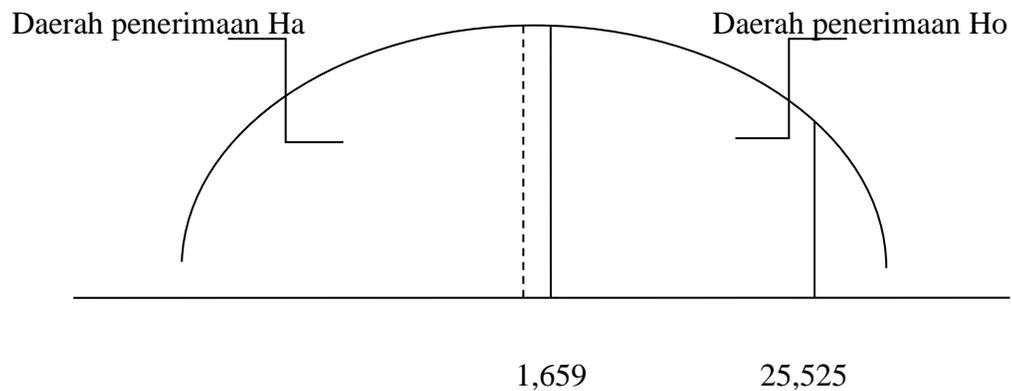
Harga thitung tersebut selanjutnya di bandingkan dengan harga ttabel dengan derajat kebebasan $(dk) = n - 1 = 109 - 1 = 108$ dan taraf kesalahan $\alpha = 5 \%$, dimana untuk satu uji pihak kiri (*one tail test*), karena harga thitung lebih besar dari harga ttabel atau H_0 ($25,525 > 1,659$) dan jatuh pada daerah penerimaan H_0 , sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari perhitungan ditemukan bahwa tingkat Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 :

$$\text{Implementasi dana BOS} = \frac{10.762}{13.625} \times 100 \% = 78,9 \%$$

Jadi, telah di ketahui bahwa tingkat Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 adalah sebesar 78,9 %.

Gambar 5
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis



4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif yang dibuat peneliti ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban rumusan masalah yaitu

bagaimanakah Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009. Pertama menentukan jawaban skor besaran ideal. Skor ideal ini merupakan skor yang ditetapkan dengan anggapan responden pada setiap pertanyaan memberikan jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya kita dapat mengetahui dari data skor yang diperoleh melalui jawaban responden dibagi dengan skor ideal.

Hampir sama dengan perhitungan skor ideal pada pengujian hipotesis, maka berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal variabel adalah $5 \times 25 \times 109 = 13.625$ (kriteria skor berdasarkan pada Skala Likert). Sedangkan skor penelitian adalah 10.762 (lihat lampiran grafik distribusi data). Dengan demikian nilai Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 adalah $10.762 : 13.625 = 0,789$ maka dalam persentase menjadi 78,9 %.

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 adalah 78,9 %. Untuk memperjelas perhitungan diatas adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \text{Skor hasil penelitian} : \text{Skor ideal} \times 100\%$$

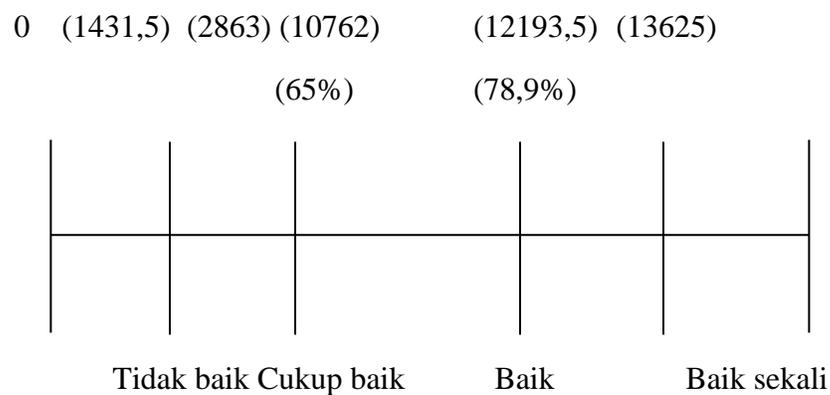
$$\text{Nilai} = 10.762 : 13625 \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = 0,789 \times 100\%$$

Nilai = 78,9 %

Maka secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 4.26
Grafik Kontinum



Dilihat dari grafik di atas, dapat kita lihat bahwa data yang diperoleh dari 109 responden maka rata-rata dari 10762 atau 78,9 % terletak pada kategori baik. Karena H_0 yang diterima sebesar 78,9 % dari yang ditargetkan paling tinggi 65%. Maka dari itu Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 sudah optimal.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, maka dapat diketahui jawaban empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang

telah ditetapkan semula yaitu Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 mencapai 78,9 %, artinya Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 sudah optimal.

Sudah optimalnya Implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditingkat Sekolah Dasar Se-Kecamatan Balaraja Tahun 2009 tersebut dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle, yaitu keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*). Dimana keberhasilannya ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of policy* dan *context of policy*. Hal –hal tersebut merupakan alat ukur untuk mengukur implementasi dana BOS. Di bawah ini dapat dijelaskan menurut Grindle :

Dimensi Pertama Yaitu *Content of policy* (isi kebijakan), dimensi pertama ini memiliki 6 (enam) indikator yaitu (1) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber-sumber daya yang digunakan.

Dari keenam indikator di atas sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi sebesar 83,9 %, sehingga pada dimensi ini menunjukkan kategori baik dan dari dimensi ini, peneliti dapat mengetahui sejauhmana program BOS di sekolah

dasar (SD) se-Kecamatan Balaraja berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak). Program dana BOS di Kecamatan Balaraja terdapat 29 sekolah dasar yang mendapat bantuan dari pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada para pelaksana program BOS di sekolah dasar, seperti kepala sekolah, bendahara, komite, dan perwakilan satu orang tua siswa dari setiap sekolah dasar (SD). Dengan jumlah responden 116 responden yang dikurangi 7 (Kepala Sekolah yang merangkap) sehingga menjadi 109 responden. Dari jawaban kuesioner tersebut menghasilkan hasil implementasi dana BOS di tingkat sekolah dasar Se-Kecamatan Balaraja mencapai 78,9 %. Sehingga dapat dikatakan implementasi dana BOS sudah mampu berjalan dengan baik. Namun, pada dimensi ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaan yaitu responden masih merasakan kurangnya sosialisasi.

Kurangnya sosialisasi di sini dengan maksud bahwa dalam pelaksanaan program BOS di sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Balaraja belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja. Sehingga menyebabkan pihak sekolah kurang memahami penggunaan dana BOS. Seharusnya sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak UPT Dinas Pendidikan pada saat diturunkannya dana BOS.

Sosialisasi sangat mempengaruhi demi kelancaran dan tercapainya keberhasilan program BOS. Dengan sosialisasi maka sekolah pun atau pelaksana program akan dapat memahami apa yang harus dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak). Sosialisasi merupakan suatu tugas dan kewajiban dari tim manajemen kabupaten

yaitu UPTD Pendidikan Kecamatan Balaraja. Maka dari itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik yang menyangkut kebijakan, pelaksana kebijakan. Serta antara satu indikator dengan indikator lainnya juga akan saling mempengaruhi. Dengan demikian dengan adanya komunikasi yang intensif dan sosialisasi yang baik, maka hal tersebut sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan program.

Menurut Bazzi sosialisasi merupakan tahap pelaksanaan program BOS yang paling tidak memuaskan. Penilaian tersebut akibat dari adanya anggapan bahwa sosialisasi sangat penting bagi keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan tahap-tahap program selanjutnya, namun pelaksanaannya terkendala oleh minimnya sumberdaya dari pihak UPT Dinas Pendidikan untuk sosialisasi program dana BOS ke sekolah-sekolah, sehingga sosialisasi adalah tahap terlemah dalam program ini.

Dimensi kedua yaitu *Context of policy (konteks policy)*, dimensi kedua ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, (3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Menurut Grindle dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala. Utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks). Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah suatu kebijakan di transformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berjalan dengan lancar hal ini ditentukan oleh *implementability*.

Dari ketiga indikator di atas sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi sebesar 66,2 % sehingga masuk dalam kategori cukup. Pada dimensi ini sebagian responden merasakan bahwa indikator yang dibuat peneliti melalui pernyataan, sudah dapat mendukung program BOS di SD se-Kecamatan Balaraja, dimana para aktor atau pelaksana program di sekolah memiliki strategi yang baik untuk kelancaran program BOS ini, yaitu dengan adanya kesatuan informasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS (kepala sekolah, bendahara, komite dan perwakilan satu orang tua siswa tiap sekolah dasar), dan adanya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja. namun ada kendala yang dihadapi yaitu tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dimana responden merasakan tingkat kepatuhan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Pada dimensi ini kendalanya yaitu karena disebabkan kurangnya ketepatan sekolah dasar dalam menyerahkan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada pihak UPT Dinas Pendidikan, dimana keterlambatan penyerahan bisa sampai dengan 1 bulan, sehingga mengakibatkan penyaluran dana BOS pun menjadi terlambat hingga 2-3 bulan. Hal ini disebabkan karena sekolah belum paham sepenuhnya terhadap penggunaan dana BOS, sehingga menyebabkan pihak sekolah sering terlambat dalam menyelesaikan atau menyerahkan surat pertanggung jawaban ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja.

Menurut Ripley Kepatuhan itu muncul dari literatur administrasi publik dan perspektif ini memusatkan perhatiannya pada apakah individu bawahan mematuhi perintah badan atau individu atasan. Dimana implementor harus patuh pada aturan dan petunjuk pelaksanaan (juklak). Sehingga kita dapat mengetahui sejauhmana tingkat kepatuhan para pelaksana program atau kebijakan. Dengan demikian keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni, sebagai berikut:

1. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009 sudah optimal (Baik)
2. Bahwa dalam pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009 dapat diketahui dari dimensi pertama menurut Grindle yaitu *content of policy* (isi kebijakan), dimana hasil dari dimensi pertama, implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) mencapai hasil 83,9 % sehingga implementasi dana BOS di tingkat sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Balaraja sudah dapat dikatakan baik.
3. Pada dimensi kedua yaitu *context of policy* (konteks kebijakan), dari dimensi kedua ini, hasil implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Balaraja sudah cukup baik dengan nilai 66,2 %.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul "Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kecamatan Balaraja tahun 2009" adalah sebagai berikut:

1. Pihak UPTD Pendidikan Kecamatan Balaraja harus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah dasar (SD) Kecamatan Balaraja. Supaya tim manajemen sekolah dapat menjalankan penggunaan dana BOS dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Agar pelaksanaan kebijakan program dana BOS di sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Balaraja dapat tercapai sesuai harapan.
2. Sekolah harus memiliki kepatuhan dalam menyerahkam SPJ atau surat pertanggung jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Supaya proses penyaluran dana dari pemerintah tidak terhambat dan dana dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. “ *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* “. Malang : UMM
- Agustino, Leo.2006. “*Politik Dan Kebijakan Publik*”. Bandung : AIPI Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Edward III, George C. 1984, *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Nugroho, Riant D. 2004. “*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*”. Jakarta : PT Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2009 . “*Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*” . Jakarta
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sarwono, jonathan. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : LPPM Universitas Komputer Indonesia
- Sugiyono . 1998 . “*Metode Penelitian Administrasi*”. Bandung : Alfabeta

Sumber-sumber Lain :

Arsip UPTD Pendidikan Tentang Daftar Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sumber : Skripsi Budi Hendrawan. 2008. [http ://file.upi.edu/Direktori/Bambang Aviv Priana/](http://file.upi.edu/Direktori/Bambang_Aviv_Priana/)

<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan> tanggal 20 November 2010

<http://samibazzismeru.or.id/newslet/2006/news19.pdf> tanggal 5 April 2011

[http://suharyowidjayanti.or.id/newslet/bidangpendidikanbantuanoperasional sekolah/2006/news19.pdf](http://suharyowidjayanti.or.id/newslet/bidangpendidikanbantuanoperasional_sekolah/2006/news19.pdf) tanggal 5 April 2011